PANDANGAN MASYARAKAT ACEH TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)

Fitri Muliati
NIM. 29173465

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Agama Islam

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PANDANGAN MASYARAKAT ACEH TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)

FITRI MULIATI
NIM. 29173465
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Lukman Hakim, M.Ag	Dr. Husna M. Amin, M.Hum

AR-RANIRY

LEMBARAN PENGESAHAN

PANDANGAN MASYARAKAT ACEH TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)

FITRI MULIATI
NIM. 29173465
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 27 Juli 2021 M / 17 Dzulhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Loeziana Uce, M. Ag

Sekretaris,

Suherman, SIP., M. Ec

Penguji,

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA

Penguji,

Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA

Penguji,

Dr. Husna M. Amin, M. Hum

Penguji,

Dr. Lukman Hakim, M. Ag

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Dr. H. Saifullah Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitri Muliati
Tempat Tanggal Lahir	: Paya Udeung, 17 Juli 1994
Nomor Induk Mahasiswa	: 29173465
Program Studi	: Ilmu Agama Islam
Konsentrasi	: Pemikiran Dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Fitri Muliati

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah[1] dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘-
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	`-
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

[1]‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an,* Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

Catatan:

1. *Vokal tunggal*

   _____َ_____, *(fatḥah)* = a misalnya, **حدث** ditulis *ḥadatha*

   _____ِ_____, *(kasrah)* = i misalnya, **وقف** ditulis *wuqifa*

   _____ُ_____, *(ḍammah)* = u misalnya, **روي** ditulis *ruwiya*

2. *Vokal Rangkap*

   (ي) (fatḥah dan ya) = *ay*, misalnya **بين** ditulis *bayna*

   (و) (fatḥah dan waw) = *aw*, misalnya **يوم** ditulis *yawn*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

   (ا) (fatḥah dan *alif)* = a

   (ي) (kasrah dan *ya)* = i

   (و) (ḍammah dan *waw)* = u

   Misalnya : (**معلول , تصديق , برهان**) ditulis *burhān, taṣdīq, ma'lūl.*

4. *Tā' Marbūtah (ة)*

   Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya (**الفلسفة اللأولى**) = *al-fasafat al-ūlā*.

   Sementara *tā' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (**مناهج الادلة , دليل الإناية , تهافت الفلاسفة**,) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (Tasydīd)*

   Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ـّـ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (**خطابية**) ditulis *khattābiyah.*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu, al-nafsu.*
7. *Hamzah (ء)*
   Untuk Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malā’ikah,* جزئ ditulis *juz’i.* Adapun Hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

Cet	= Cetakan
Hal	= Halaman
UIN	= Universitas Islam Negeri
SAW	= Shallallahu ’Alaihi Wasallam
SWT	= Subhanahu Wata’ala
HR	= Hadith Riwayat
QS	= Qur’an Surat

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya.

Untuk melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar magister pada prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun tesis dengan judul **"Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)**

Begitu banyak tantangan dan rintangan turut mewarnai proses penyelesaiannya, akan tetapi, berkat usaha, keyakinan, harapan serta bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih atas doa kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang, motivasi, dan tidak henti-hentinya mendoakanku, kemudian untuk suami tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayangnya, terima kasih untuk seluruh keluarga, abang dan kakak atas segenap kepercayaannya, kesabarannya, cinta dan kasih sayang kalian semua demi selalu memahami dan mengarahkan penulis sampai pada tahap ini.

Teristimewa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Husna Amin, M. Hum sebagai pembimbing kedua. Yang dengan segala keluasan ilmunya, kebesaran hatinya selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu membimbing penulis agar dapat menyelesaikan proses rampungnya tesis ini.

Penghormatan dan terima kasih juga kepada Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta kepada ketua prodi, sekretaris prodi para dosen yang telah mengajari penulis selama beberapa waktu di kampus pascasarjana, juga kepada para staf bagian umum, bagian akademik, tata usaha dan keuangan kampus pascasarjana, yang selama ini mungkin banyak direpotkan oleh pribadi ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di lokasi penelitian, kepada DPC PKS dan DPC PKB Kabupaten Nagan Raya, para masyarakat yang penulis wawancarai dan teman-teman lainnya dilokasi penelitian.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan oleh ragam pihak, semoga mendapat ganjaran dan menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 4 November 2021
Penulis,

Fitri Muliati

ABSTRAK

Judul	: Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)
Nama Mahasiswa/NIM	: Fitri Muliati/ 29173465
Pembimbing	: 1. Dr. Lukman Hakim, M. Ag 2. Dr. Husna Amin, M. Hum
Kata Kunci	: Pandangan, Partai Politik

Meskipun partai politik Islam mengidentifikasikan diri sebuah partai yang membawa simbol-simbol agama, tetapi tidak lantas menyebabkan masyarakat tertarik. Hal ini disebabkan karena partai-partai Islam belum mampu memperjuangkan kepentingan kaum muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Aceh terhadap partai politik Islam studi kasus pada partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Aceh terhadap partai politi Islam ada yang menilai positif dan negatif. Hal tersebut tergantung bagaimana masyarakat melihat aksi-aksi nyata para pertugas partai di lapangan. positif penulis menemukan partai PKB dan PKS benar-benar menunjukkan diri sebagai partai yang berbuat untuk masyarakat Nagan Raya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya program pro rakyat yang telah dilakukan. Yang berangkapan negatif penulis dapatkan bahwa partai yang berazaskan Islam di Nagan Raya hanya sekedar coraknya saja Islam, tapi dalam program-programnya tergantung siapa sosok kader didalam partai tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa partai politik Islam dipandang masyarakat baik karena melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Namun jika partai tersebut tidak memberikan keuntungan nyata dalam bagi masyarakat maka partai tersebut tidak baik, dan tidak mendukungnya meskipun pastai Islam.

ABSTRACT

Thesis Title	:	Acehnese People's Views of Islamic Political Parties (A Case Study of Islamic Political Parties in Nagan Raya District)
Name/NIM	:	Fitri Muliati/ 29173465
Supervisors	:	1. Dr. Lukman Hakim, M. Ag 2. Dr. Husna Amin, M. Hum
Keywords	:	Views, Political Parties

Despite identifying themselves as parties that carry religious symbols, Islamic political parties do not necessarily attract the public attention. This is perhaps due to the inability of many Islamic parties to fight for the interests of Muslims. This study aims to describe the Acehnese people's views on Islamic political parties, a case study of Islamic political parties in Nagan Raya District. The study used the field research approach. Data were collected by means of observation, interview, and documentation. The data were then analyzed using qualitative descriptive analysis with reference to the theoretical basis. The results of the study showed that the views of the Acehnese people towards Islamic political parties have been both positive and negative, depending on how the people perceive the real actions of party officials in the community. Some people positively perceive that Islamic parties, such as the PKB and PKS, have truly shown themselves as parties that act for the people of Nagan Raya, as evidenced by the many pro-people programs that have been carried out. In contrast, others negatively view that Islamic-based parties in Nagan Raya only appear to be Islam-like while their programs work depending on the cadre figures of the parties. To conclude, the people will see any Islamic political parties as good parties with respect to the activities they carry out. However, if the parties do not provide real benefits to society, the people will poorly perceive them and will not support them even though they are Islamic-based.

الملخص

عنوان الرسالة : رأي مجتمع أتشيه في الأحزاب السياسية الإسلامية (دراسة حالة عن الأحزاب السياسية الإسلامية في منطقة نجان رايا)

المؤلف / رقم القيد : فطري موليانتي /29173465

الإشراف : 1- الدكتور لقمان الحكيم الماجستير

2- الدكتورة حسنى آمين الماجستير

الكلمات المفتاحية : رأي، حزب سياسي

على الرغم من أن الحزب السياسي الإسلامي يعرّف نفسه على أنه حزب يحمل رموزًا دينية، إلا أنه لم يكن بالضرورة ينجذب إليه الناس. وذلك لأن الأحزاب الإسلامية لم تكن قادرة على القتال أو النضال من أجل مصالح المسلمين. تهدف هذه الدراسة إلى وصف آراء مجتمع أتشيه حول الأحزاب السياسية الإسلامية، دراسة حالة عن الأحزاب السياسية الإسلامية في منطقة ناجان رايا. تعتبر هذة الدراسة دراسة ميدانية حيث تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق. ويكون تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي النوعي معتمدا على الأساس النظري. تدل نتائج الدراسة على أن أراء مجتمع أتشيه حول الأحزاب السياسية الإسلامية تكون إيجابية وسلبية. وذلك يتوقف على الوجهة التي يرى بها المجتمع النشاط الحقيقي لمسؤولي تلك الأحزاب في الميدان. وتجد الباحثة الرأي الإيجابي في حزب النهضة الوطنية وحزب العدالة والتنمية حيث يشكل كلا الحزبين العمل الحقيقي من أجل مصالح مجتمع نجان رايا. يتضح هذا من خلال العديد من البرامج المؤيدة للشعب التي تم تنفيذها وتحقيقها. أما الرأي السلبي ترى الباحثة في

الأحزاب التي تحمل شعار الإسلام في الظاهر، مع أن برامجها تتغير بتغير الأشخاص فيها. من خلال نتائج الدراسة، تستخلص الباحثة بأن الأحزاب السياسية الإسلامية تُرى جيدة وفق الأعمال التي تقوم بها. أما إذا لم تقدم أي مصالح محققة للمجتمع، فلا يقيم لها وزنا، مهما كانت من الأحزاب الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 5
E. Kajian Pustaka 5
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 10
H. Teknik Pengumpulan Data 11
I. Teknik Analisis Data 13
J. Teknik penulisam 15
K. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI DAN PARTAI POLITIK ISLAM **18**

A. Pandangan (Persepsi) 18
1. Pengertian Pandangan (Persepsi) 18
B. Syarat-syarat terbentuknya Persepsi 21
C. Proses terbentuknya Persepsi 22
D. Ciri-ciri Persepsi 24
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 25
F. Partai Politik 27

1. Pengertian Partai Politik 27
2. Fungsi Partai Politik 30
G. Partai Politik Islam 33
1. Definisi Partai Politik Islam 33
2. Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia 36
3. Peran dan Fungsi Partai Politik Islam 46

BAB III HASIL PENELITIAN 49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
B. Partai Politik Islam yang Diteliti 55
C. Pandangan Masyarakat Nagan Raya Terhadap Partai Politik Islam 65
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat 73
E. Peran dan kontribusi Partai PKS dan PKB..... 78

BAB IV PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81
B. Saran-saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks proses politik formal, partai politik menjadi arena perjuangan sekaligus pertarungan. Partai yang berbasis Islam seperti PKS dan PKB, tidak beda dengan partai nasional lainnya yang selalu ikut bertarung pada saat pemilu berlangsung. Sejarah perkembangan politik, partai politik memainkan peranan sebagai penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan masyarakat serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Apalagi Nagan Raya sebagai kabupaten baru di Provinsi Aceh yang berdiri sejak tahun 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat, hadirnya partai perbasis Islam seperti PKS dan PKB di Nagan Raya sejak tahun 2003, telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam sejarah pemilu di Nagan Raya eksistensi partai politik Islam tidak dapat diabaikan. Keberadaannya cukup mewarnai konstelasi dan dinamika politik Nagan Raya sejak awal pemilihan tahun 2007. Pada tahun pemilihan pertama, kedua partai tersebut memiliki kepercayaan di masyarakat Nagan Raya untuk menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rayat. Namun di sisi lain ada fakta yang tidak mengonfirmasi kebenaran pandangan tersebut di atas, yaitu kekalahan demi kekalahan kedua partai politik tersebut dalam setiap Pemilu, bahkan cenderung mengalami kemunduran yang disebabkan banyaknya faktor yang menyertainya.

Sementara keberadaan parpolpun digambarkan sebagai "pabrik rokok", memproduksi banyak merek untuk mengait berbagai pembeli. Misalnya partai A untuk merangkul kelas bawah, miskin, non Islam. Partai B untuk segmen yang sama, namun untuk kalangan Islam. Lalu partai C untuk kelas menengah kota, modern, dan Islam, dan seterusnya. Maka dari itu semua partai melakukan cara yang sama untuk untuk menarik simpatisan masyarakat.

Sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti atau mendukung partai tersebut.

Partai Politik Islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang Islam yang bertujuan untuk melakukan aktivitas politik sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.[1] Partai politik Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, Pertama, yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal; Kedua, partai yang mementingkan pengembangan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pendekatan dalam menangkap ajaran Islam, sebagaimana juga keduanya memiliki perbedaan dalam orientasi dan program.[2]

Adapun tujuan partai Islam adalah menegakan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia ini. Karena Islam wahyu atau risalah yang diberikan Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat sebagai pedoman bagi kebahagian hidup di dunia dan akhirat.[3]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partai politik Islam adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur'an dan Hadist) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara. Tentu karakter parpol Islam memiliki nilai lebih dalam kehidupan masyarakat dibandingan partai nasional lainnya. Idealnya, jika sebuah partai sudah berani membawa embel-embel Islam, tentu tidak sekedar nama, namun isi dan konsekuensinya juga harus diperhatikan, agar selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun

---

[1] Fatahullah Jurdi, *Politik Islam* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), hlm. 129.

[2] Thoyib, dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta: PT. RemajaRosdakarya, 2002), hlm. 18.

[3] Thoyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata...*, hlm. 23.

dalam realitasnya, justru eksistensi partai politik berasis Islam lebih dipengaruhi oleh eksistensi partai nasional.

Berbicara tentang partai, di Nagan Raya banyak partai nasional lainnya yang bersaing pada saat pemilihan, seperti partai Golkar, Demokrat, Gerindra, dan masih banyak partai nasional lainnya yang terus bersaing antar partai untuk mendapatkan suara terbanyak pada saat pemilihan. Setiap partai melakukan barbagai cara pada saat kampanye dan menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Namun tak jauh bedanya dengan partai PKS dan PKB, mereka tetap eksis dalam melakukan kampanye dan menyampaikan visi dan misinya.

Tidak bisa dipungkiri kursi untuk kader partai PKS dan PKB masih belum banyak menduduki posisi sentral dan berpengaruh di Nagan Raya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara hipotesa, pandangan masyarakat Nagan Raya terhadap partai-partai Islam belumlah terlalu siginifikan, sehingga partai-partai Islam dianggap belum mampu membawa aspirasi masyarakat ke parlement, meskipun embel-embel Islam sangat kuat dalam partai tersebut, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi agar masyarakat benar-benar tersadar untuk mendukung dan memberi pilihan penuh kepada partai yang berasas Islam di Nagan Raya.

Hasil observasi di kantor KIP Nagan Raya menunjukkan kemenangan partai politik Islam PKB dan PKS di Nagan Raya pada saat pemilihan tahun 2019, Partai PKB hanya memiliki satu kursi di Dewan perwakilan Rakyat sedangkan PKS tidak mendapatkan Kursi.[4]

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai politik Islam di Aceh, khususnya di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk baru di Aceh setelah mengalami pemekaran. Di samping karena alasan bahwa

---

[4] Hasil wawancara dengan Zainal yang bekerja di KIP Nagan Raya pada tanggal 5 september 2020.

peneliti juga merupakan putra daerah yang berasal dari kabupaten tersebut. Ada banyak Partai politik di Kabupaten Nagan Raya, termasuk partai politik berasas Islam seperti PKS, PKB, PPP dan PBB, namun sebagaimana yang penulis paparkan di atas, eksistensi mereka masih kurang dikenal dalam masyarakat, sehingga di setiap kontestasi pertarungan politik, partai-partai Islam ini belum bisa mendominiasi suara terbanyak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul *"Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)".*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pandangan masyarakat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh terhadap partai politik Islam ?
3. Bagaimana peran dan kontribusi partai politik Islam dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh.
2. Menguraikan Faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif masyarakat Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh terhadap partai politik Islam.
3. Mengkaji peran dan kontribusi partai politik Islam dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh?

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat secara praktis:
   a. Penelitian ini diharapkan berguna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian partai politik Islam di Aceh.
   b. Untuk memberi kontribusi seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap partai politik Islam.
   c. Untuk memberi wacana civitas akademik tentang agama dan negara, sehingga dapat mendorong kalangan praktisi dan akademisi agar lebih giat mengkaji mengenai penelitian yang relevan dengan tema diatas.

2. Manfaat secara teoritis:
   a. Menambah wawasan pengetahuan tentang teori partai politik Islam di Aceh.
   b. Untuk menyelesaikan beban tugas penyelesaian tugas akhir guna meraih gelar magister di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang akan diteliti sehingga diketahui hal-hal apa saja sudah ada dan yang belum diteliti, serta apa saja yang membedakan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian mengenai partai politik Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun sejauh ini kajian yang terkait mengenai pandangan masyarakat Aceh terhadap partai politik Islam studi terhadap partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya belum penulis temukan, untuk mendukung penelitian tersebut penulis melakukan penelusuran pustaka diambil dari

jurnal, tesis, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan bahan yang sedang diteliti.

Adapun karya yang penulis temukan yang berkaitan dengan partai politik Islam adalah sebagai berikut:

Budiman, Eep Saefulloh Fatah Dkk (1999) buku yang berjudul *Memilih Partai Medambakan Presiden*.[5] Dalam buku ini menjelakan tentang gagasan-gagasan seputar pendirian partai politik (baru) dan bagaimana konfigurasi politik dan ideologi yang berkembang saat ini. Dengan demikian dapat menilai dan mempertimbangkan bagaimana potret partai-partai tersebut dan sekaligus mengamati visi dan misinya.

Zuly Qodir (2012) buku yang berjudul, *Sosiologi Politik Islam; Kontestasi Politik Islam dan demokrasi di Indoneisa.*[6] menjelaskan bahwa partai politik Islam sebagai salah satu arena dan sekaligus medium untuk memberikan partisipasi umat Islam yang melatar belakangi politik praktis, sekalipun partisipasi politik umat dalam bentuk lain bisa dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU.

Dalam skripsi yang disusun Isnani Nurul Fajri (2017) yang berjudul *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahankompri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung*)[7]. Menjelaskan bahwa alasan masyarakat tidak memilih partai poitik Islam karena partai politik Islam memiliki citra yang kurang bagus. Masyarakat hendaknya tidak mudah mempercayai sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya sedangkan untuk partai Islam agar lebih bisa bersosialisasi dan merangkul

---

[5] Arief Budiman, EEP Sefulloh Fata Dkk, *Memilih Partai Mendambakan Presiden: Belajar Berdemokrasi di Ufuk Mienium* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)

[6] Zuly Qodir, *Sosiologi Poitik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

[7] Isnani Nurul Fajri (2017), *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam* (Studi Kasus Kelurahankompri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Banda Lampung).

masyarakat agar masyarakat lebih mengenal partai politik Islam dengan lebih baik.

Dalam skripsi Noor, Hardian (2017) *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu.*[8] Hasil penelitian menjelaskan kendalanya partai politik Islam dalam Pemilu adalah banyaknya partai politik Islam itu sendiri, sehingga perolehan suara dalam pemilu sangat kecil karena terbagi dengan partai Islam yang lain dan partai politik Islam masih belum mampu menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa partai Islam adalah partai harapan yang bisa mengubah kehidupan yang lebih baik.

Dalam jurnal.umrah.ac.id/wp karya *Said Riduan* tentang Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang. Adapun hasil penelitiannya persepsi masyarakat Kelurahan Penyengat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kuisioner yang telah disebar kepada masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pengalaman belum dapat mempengaruhi persepsi masyarakat di Kelurahan Penyengat, terlihat sekitar 26,88 persen masyarakat mengatakan bahwa pada kelurahan penyengat masyarakat masih belum banyak yang ikut dalam partai politik dan pembelajaran politik pun tidak didapatkan. Dorongan dan keinginan masyarakat masih sangat kuat untuk masuk kedalam partai politik.[9] Dapat disimpulkan bahwasannya minimnya pendidikan politik di masyarakat sehingga sangat sedikit yang tertarik untuk berpolitik.

Adapun perbedaan tesis penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menitik beratkan pada padangan masyarakat Aceh terhadap parpol Islam studi terhadap

---

[8] Noor, Hardian (2017) *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu.* Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

[9] http://jurnal.umrah.ac.id/wp. *Said Riduan*, Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota Tanjungpinang. Di akses pada tanggal 20 Juni 2020.

partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya, dengan melihat fenomena yang terjadi. Dari keseluruhan sumber kepustakaan yang telah ditelusuri, belum ditemukan satupun tulisan secara khusus membahas tentang pandangan masyarakat Aceh terhadap partai politik Islam studi di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karenanya penelitian ini dianggap masih relevan untuk dilanjutkan karena penulis tidak menemukan judul yang sama pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan landasan teori yang dianggap relevan. Adapun teori yang relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisasi secara teratur berdasarkan ideologi/program dimana ada keinginan para pemimpinnya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik.

Teori Kuntowijoyo menjelaskan bahwa partai politik Islam adalah mencerdaskan kehidupan muslim di Indonesia agar mampu bersaing dengan umat manapun di dunia dengan pembinaan al-Qur'an dan as-Sunnah secara luas; dan era globalisasi adalah tantangan yang harus dihadapi.[10]

Amien Rais mengatakan bahwa sebuah Partai Politik dibentuk pasti dengan maksud baik, yakni menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat yang memilihnya agar kepentingan rakyat tidak dilupakan kita tidak akan membayangkan ada kehidupan demokasi tanpa partai-partai politik.[11]

---

[10] Eggi Sudjana. *Islam Fungsional* (Jakarta: Rajawali. 2008), hlm. 122.

[11] Saiful Mujani, R. William Lidle, dan Kuskrriho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analilis tentang Perilaku Memiih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2012), hlm. 19.

Munir Mulkhan mengatakan bahwa partai-partai Islam dengan jalur politik selalu mengalami kegagalan besar, bila tidak dikatakan kebangkrutan fatal. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah orientasi baru tetang politik Islam di Indonesia. Yang paling relevan untuk menggambarkan posisi partai Islam dalam bentuk politik nasional. Sebuah negeri dengan penduduk mayoritas beragama Islam (88%), di sepanjang pemilu yang pernah diselenggarakan di negeri ini, partai Islam tidak pernah menang. Dari pemilih yang memeluk Islam diperkirakan hanya (40%), yang memilih partai Islam atau partai yang berbasis Muslim.[12]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik Islam adalah partai yang sangat mengedepankan ideologi dan menampung serta menyuarakan aspirasi rakyat atas kepentingan rakyat. Namun partai Islam dengan jalur politik selalu mengalami kegagalan maka perlu orientasi baru untuk mengubah pemahaman masyarakat.

Dari beberapa teori di atas dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian. Namun, ada dua teori yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu: teori yang di kembangan oleh Kuntowijoyo tentang kecerdasan umat muslim agar mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi dengan mengetahui ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, dan teori yang dikembangkan oleh Amien Rais, sebuah partai harus menyuarakan aspirasi rakyatnya dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Berpijak pada permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, teori di atas dipandang relevan digunakan sebagai landasan pijak dalam mengidetifikasi serta menganalisis bebebagai pandangan yang berkembang dimasyarakat, sehingga jawaban dari hasil penelitian mampu dijelaskan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

[12] Munir Mulkan, *Sosiologi Poitik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2011), hlm. 115.

G. Metode Penelitian

Menurut Narbuko dan Achmadi metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.[13] Adapun menurut Sutrisno "penelitian" adalah sebagai usaha menemukan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan cara menggunakan metode ilmiah.[14]

Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui dilapangan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.[15] Atau bisa dikatakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggunakan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.[16] Adapun Langkah-lakah atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research),* dalam arti data penelitian didasarkan pada hasil dari studi partisipatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang penelitinya ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati

---

[13] Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), hlm. 1.

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara, 1997), hlm. 115.

[15] Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 13.

[16] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Jakarta: Rineka Cita, 1993), hlm106.

apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail.[17]

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian mengenai pandangan masyarakat Aceh terhadap partai politik Islam ini berada di Kabupaten Nagan Raya. Penulis memilih lokasi ini dengan beberapa pertimbangan yaitu: karena penulis merupakan putri berasal dari Nagan Raya sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, kemudian berdasarkan obeservasi kedua partai yang ingin penulis teliti sangat familiar di bicarakan oleh masyarakat umum Nagan Raya sehingga mempermudah Subjek Penelitian.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan tekhnik *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.[18] Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan, misalnya responden tertentu merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penelitian untuk menjalankan objek atau situasi sosial yang diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk meperoleh data-data lapangan ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

[17] Safril Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*(Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 31.

[18] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

a. Observasi

Observasi sering disebut proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[19]Adapun teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), seperti yang diungkapkan Pabundu Tika, bahwa: observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada pada objek yang diteliti.[20]

Penulis juga menggunakan teknik observasi terlibat (*Partisipant observation*).[21] Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan ikut mengambil bagian atau melibatkan diri dengan aktivitas objek yang di amati. Yang di observasi pada penelitian ini adalah pandangan masyarakat Aceh terhadap porpol Islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Menurut Esterbarg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanyajawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.[22] Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan memperoleh hasil penelitian yang akurat sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara

---

[19] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hlm. 52.

[20] Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset bisnis* (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.

[21] Rusdi Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Yagyakarta: Ar-Rijal Institut, 2007), hlm. 53.

[22] Ugiyona, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabet, 2005), hlm. 72.

terbuka supaya responden memberikan informasi yang tidak terbatas.[23]

Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak tersetruktur. Wawancara campuran adalah wawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan. Tetapi cara pengajuan pertanyaan, diserahkan kepada kebijakan wawancara itu sendiri.[24] Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlah mengikuti pesta demokrasi. Penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan tentang bagaimana pandangan masyakat terhadap partai politik Islam.

Yang penulis jadikan responden dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua partai PKB
2. Ketua partai PKS
3. Anggota Partai PKS
4. Anggota Partai PKB
5. Kip Nagan Raya
6. Mahasiwa
7. Tokoh agama
8. Kepala desa
9. Akademisi
10. Masyarakat biasa

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Lexy J. Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan menuruskan data kedalam pola, katagori dan satu uraian dasar

---

[23] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 98.

[24] Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset...* , hlm. 63.

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[25]

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah termasuk pola penelitian kualitatif, maka untuk mengolah data penulis mengunakan teori Miles dan Huberman yaitu; reduksi data, dispay data dan verifikasi data.[26] Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[27] Penulis menelaah kembali semua catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan telaah. Data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan carameringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[28] Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dan bentuk deskriptif

---

[25] Lexi J. Moleong, *Penelitian*..., hlm. 10.

[26] Mattew B. Miles A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi (Jakarta: UI Pers, 1992), hlm. 15.

[27] Sugiano, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 82.

[28] Sugiano, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 95.

yang naratif dan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang pandangan mayarakat Aceh terhadap partai politik Islam studi terhadap di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fokus rumusan masalah. Data yang sudah direduksi dan di klarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remangatau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[29] Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Penulis pada tahap ini mencobamenarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

J. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penulisan berdasarkan buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pasacasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018.

K. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi tesis ini menjadi empat bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang selanjutnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa subbab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan: yang meliputi gambaran dari keseluruhan tesis yaitu; meliputi latar belakang masalah, rumusan

---

[29] Sugiano,*Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm. 99.

masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II, dalam bab dua ini sebagai landari teori berisi, pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga diperlukan landasar teori terlebih dahulu. Dalam landasan teori ini ada beberapa hal yang meliputi: pandangan (persepsi) yang terlebih dahulu penulis cari tau untuk memudahkan dalam menafsikan atas apa yang ingin penulis teliti, kemuadia tentang partai politik, mencangkup mengenai pengertian partai politik, tentang syarat-syarat terbentuknya partai politi dan fungsi partai politi, dimana kesumau itu di perlukan dalam penulisan penelitian ini.

Kemudian pembahasan mengenai partai politik Islam, dimana dalam penulisan di maksudkan untuk mendefinisi partai politik Islam, selanjutanya untuk mengetahuai sejarah Partai Politik islam di Indoneisa, serta apa fungsi dan peran partai politik Islam. Kesemua hal tersebut sangat diperlukan dalam pembahasan bab kedua.

Bab III, merupakan paparan hasil penelitian yaitu menjelaskan gambaran lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini menjadi obaje di mana penulis melakukan peneliian. Sehingga penulis mengetahuai bagaia mana kondisi umu tempat penulis melakukan penelitian. Kemudian juga membahas tentang profil kedua parati Islam PKS dan PKB yang ingin penulis teliti. Kemudia mewawancarai masyarakat untuk mengetahui bagai mana pandangan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Nagan Raya. Selanjunya menyebutkan faktor–faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap parpol Islam, terakhir tentang peran dan kontribusi partai Islam terhadap masyarakat Nagan Raya.

Bab IV, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Pada bab ke empat ini berisi kesimpulan untuk mempermudah pembaca dalam mengambil kesimpulan, dan saran merupakan harapan penulis untuk pembaca, sudi kiranya memberi kritikan dan saran untuk penelitian ini, karena penelitian ini masih banyak kekurangan.

BAB II
KAJIAN TEORETIS TENTANG PERSEPSI DAN PARTAI POLITIK ISLAM

A. Pandangan (Persepsi)

1. Pengertian Pandangan (Persepsi)

Pandangan yang dalam penelitian ini dimaksud juga sebagai persepsi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.[30]

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik

---

[30] Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2009), hlm. 21.

atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.[31]

Menurut Asrori pengertian persepsi adalah "proses individu dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman." Dalam pengertianpersepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interprestasi dan pengorganisasian. Interprestasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.[32]

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Rahmat Jallaludin mendefiniskan pengertian persepsi sebagai: "pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan". Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.[33]

Menurut Slameto pengertian persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat

---

[31] Sugihartono, dkk, *Persepsi-Persepsi Dalam Psikologi*, (Medan: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 8.

[32] Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2009), hlm. 21.

[33] Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1990), hlm. 64.

inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.[34]

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, pengertian Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kema mpuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.[35]

Eysenck dalam Asrori menyatakan bahwa persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi.[36]

Menurut Shaleh dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* mendefinisikan bahwa persepsi sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari objek sekitar, termasuk sadar akan diri sendiri. Definisi lain menyatakan bahwa persepsi sosial (*social perception*) adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dapat disimpulkan bahwa persepsi

---

[34] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 102.

[35] Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi* , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), hlm. 89.

[36] Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hlm. 215.

sosial adalah kecakapan untuk cepat tanggap dalam memahami perasaan, sikap maupun kebutuhan manusia.[37]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya.

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu objek ataupun suatu kejadian yang dialami. Pengertian presepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Jadi persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya

B. Syarat-syarat Terbentuknya Persepsi

Menurut Walgito ada tiga syarat terjadinya persepsi yaitu:[38]

a. Adanya objek yang dipersepsi.
b. Adanya alat indra atau reseptor.
c. Adanya perhatian.

Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra (*reseptor*). Dalam hal ini objek yang diamati adalah perilaku keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran, di sini siswa diminta memberikan suatu persepsi terhadapnya. Alat indra merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi dan merupakan alat untuk menerima stimulus, tetapi harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk

---

[37] Muhammad Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2008), hlm. 88.

[38] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 54-56.

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan. Bila telah memperhatikannya, selanjutnya individu mempersepsikan apa yang diterimanya dengan alat indra. Selanjutnya Walgito menambahkan bahwa persepsi dipengaruhi banyak faktor di antaranya faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi.[39]

Menurut Parek, persepsi dipengaruhi faktor interen yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian dan kebutuhan) dan faktor ekstern yang berkaitan dengan intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan mengunakan panca indra yang dimilikinya.[40]

C. Proses Terbentuknya Persepsi

Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tesebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak.

---

[39] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*…, hlm. 54-56.

[40] Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 14.

Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis.[41]

Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (*reseptor*). Dari penyataan tersebut dapat penulis simpulkan persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respon atau tanggapan yang dimana setelah rangsangan diterapkan keapada manusia. Subprosesnya adalah pengenalan, prasaan, dan penalaran. persepsi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi atau kedua-duanya.

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponan utama berikut:[42]

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
b. Interprestasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interprestasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkatagoriaan informasi yang kompleks menjadi sarjana.
c. Interprestasi dan persepsi kemudian ditrjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai rekasi

---

[41] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*…, hlm. 62.

[42] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*…, hlm. 54.

Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interprestasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

D. Ciri Ciri Persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, terdapat ciri-ciri dalam dunia persepsi;

a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba, dan sebagainya).
b. Dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); misalnya mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang, dan lain-lain).
c. Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain-lain.
d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya[43]

Keempat ciri tersebut merupakan ciri khusus dalam dunia persepsi. Ciri pertama adalah modalitas, dimana rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera.

Ciri kedua adalah dimensi ruang yang menegaskan sifat-sifat ruang. Ciri ketiga adalah dimensi waktu yang menunjukkan sifat-sifat waktu misalnya cepat atau lambat. Ciri terakhir adalah struktur konteks artinya keseluruhan yang menyatu antara objek dengan konteksnya.

---

[43] Shaleh A. R., Muhbib A. W, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 89.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Miftah Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:[44]

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Sedangkan menurut Stephen P. Robins terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakterisktik individual yang dimilikinnya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

b. Sasaran dari persepi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

c. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimanapersepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi

---

[44] Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hlm. 54-156.

me rupakan faktor yang turut berperan dalam proses pem bentukan persepsi seseorang.[45]

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor yaitu:[46]

1. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.
3. Perhatian Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Dari pemaparan di atas dapat di pahami bahwa Faktor-faktor yang menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses

---

[45] Stephen P Robbins, *Perilaku Organisai: Konsep, Kontroversi, aplikasi, edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1999), hlm. 125.

[46] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*…, hlm. 70.

terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

F. Partai Politik

1. Pengertiaan Partai Politik

Partai politik merupakan tiang dari demokrasi di masa modern yang mana demokrasi dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam bentuk pembentukan partai politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan. Partai politik merupakan wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat modern yang plural.[47]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Partai politik juga diartikan sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga diartikan perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seazas, sehaluan, setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.[48] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik menurut bahasa adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya. Salah satunya dengan cara meraih kekuasaan.

---

[47] Firman Subagyo, *Menata Partai Politik*, (Rmbooks: Jakarta, 2009), hlm. 77.

[48] Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 120.

Partai adalah kelompok orang yang berpandangan sama, yang berjuang memperoleh kekuasan dan pengaruh didalam pemerintahan, untuk dapat mempengaruhi opini publik dan mewujudkan pandangan politik mereka. Paham Marxisme Lenisme mendefinisikan partai sebagai organisasi politik di mana di dalamnya bergabung berbagai kelas untuk mewakili kepentingan kelompoknya. Menurut Max Weber dalam suatu masyarakat moderen, kepemimpinan politik dan opini politik yang handal tidak mungkin terbentuk tanpa adanya partai.[49]

Dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo, menjelaskan bahwa Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik pertama sekali lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikut sertakan dalam proses politik.[50]

Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang setujuan terutama di bidang politik. Miriam Budiarjo (2008: 403) berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir atas kesamaan nilai dan cita-cita dengan tujuan untuk merebut kekuasaan politik.

Sedangkan menurut Sigmund Neumann (Maran, 2001: 85), mendefinisikan partai politik sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang

---

[49] Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich, 2008), hlm. 147.

[50] Nusrati, *Sistem Politik Islam (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Nur-al Huda, 2015), hlm. 39.

menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat. Jadi partai politik adalah organisasi politik yang bersaing dan berusaha merebut dukungan rakyat untuk menguasai pemerintahan.

Dari ketiga pengertian tentang partai politik tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui cara yang konstitusional atau biasanya melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Dari pendapat di atas dapat juga dikemukakan bahwa partai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu organisasi yang teratur, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Adapun cara-cara yang dicapai untuk mencapai tujuannya, partai politik turut serta dalam kegiatan yang konstituonal seperti pemilihan umum.

Dengan partai lebih mudah untuk menonjolkan tema atau permasalahan, karena tanda partai menjadi standar pengalaman partai itu diakui. Ia menjadi suatu lambang, semacam petunjuk di mana seorang itu berdiri, mungkin ia tidak sepenuhnya dapat dipercaya, namun setidaknya ia melambangkan ciri khas sesuatu. Identifikasi partai merupakan dasar untuk dukungan para pemilih yang mempunyai gambaran baik untuk partai.[51]

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin

---

[51] Arnold Stein Berg, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm. 9.

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat keadilan maupun materil.

Menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkannya sebagai pemilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.[52]

Di negara maju partai politik merupakan alat yang membuat pemerintah responsif terhadap orang-orang yang memiliki hak pilih dalam pemilu sehingga kompetisi paratai politik merupakan tanda bagi demokrasi liberal. Gagasan ideologinya adalah rakyat berhak untuk berpartisipasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk membuat kebijakan publik. Adapun dinegara totaliter, partai politik dipakai untuk maksudmasuk rejim yang berkuasa antara lain sebagai alat untuk memperluas kontrol terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asumsi para elit politik atau pemimpinan bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng.

Di negara berkembang, umumnya partai politik merupakan gejala yang muncul sebagai reaksi atas sistem kolonial yang dinilai menindas hak-hak politik masyarakat pribumi, sehingga parpol sering dipakai atau didirikan untuk pergerakan nasional diluar parlemen kolonial. Akhirnya, dimasa kemerdekaan partai politik tersebut memiliki kecenderungan untuk benar-benar berpartisipasi dalam proses politik melalui partai.

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan

---

[52] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 161.

sejumlah fungsi lain. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut.[53]

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.[54]

b. Rekrutmen Politik

Dalam ilmu politik, rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

c. Partisipasi Politik

Partai politik berfungsi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintah. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan,

---

[53] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesi, 2010), hlm. 149.

[54] Surbakti, *Memahami Ilmu,...*, hlm. 150.

mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, dan mendukung calon pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

d. Pemandu Kepentingan

Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan satu sama lain. Untuk menampung berbagai kepentingan tersebut maka partai politik dibentuk. Pemandu kepentingan dimaksudkan sebagai kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan berkepentingan satu sama lain menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e. Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.[55]

f. Kontrol Politik

Partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyiapan dalam ini kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam melaksanakan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.

Menurut Rodee mengemukakan bahwa fungsi partai politik adalah untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahnya yang mengelola isu dalam suatu kebijakan publik. Selanjutnya, Haque mengklasifikasikan fungsi partai politik dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Yang paling penting, yaitu partai politik sebagai sarana atau mata rantai antara penguasa dan rakyat sehingga partai politik

---

[55] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik…,*hlm. 153-154.

sebagai saluran ekspresi antara yang menguasai dengan yang dikuasai.

2. Partai politik sebagai agen penting untuk agregasi kepentingan.
3. Dalam pemerintahan, pemimpin partai politik merupakan pusat kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan tujuan-tujuan kolektif dari masyarakat.
4. Partai sebagai agen rekrutmen elit dan sosialisasi.
5. Partai politik sering dipandang sebagai obyek pelengkap dari kekuatan emosional yang kuat atau antagonisme yang punya pengaruh atas opini dan prilaku dari pemilihnya.[56]

G. Partai Politik Islam

1. Definisi Partai Politik Islam

Setelah memaparkan pengertian partai politik, jika dikaitkan dengan Islam maka Islam dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur‟an bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi.

Pengertian Islam Kata Islam berasal dari bahasa Arab "*aslama-yuslimu-islaman*" yang secara kebahasaan yang berarti "menyalamatkan". Kata Islam juga dapat diambil dari kata *assilmu* dan *assalmu* yang artinya perdamaian dan keamanan.[57] Jadi, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Pengertian Islam juga

---

[56] Haque, Rod et.al *Comparative Goverment and Poitics*. (Mac Millian Press,1998), hlm. 75.

[57] Abdillah, Islam *dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 54.

dapat disimpulkan sebagai suatu sistem peraturan peraturan atau undang-undang yang meliputi peraturan-peraturan hidup manusia dan tata cara tingkah laku bagi manusia yang dibawa oleh Rasullah Muhammad SAW. dari Tuhannya yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia dengan akibat pahala bagi mentaatinya dan hukuman bagi yang mengingkarinya.

Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang beerbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.[58]

Dari sinilah kemudian muncul istilah partai politik Islam atau partai yang dilandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim tak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam. Pembahasan bagaimana format dan bentuk partai Islam tidak lepas dari pola hubungan Islam dan politik yang sekarang ini berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Partai politik Islam seperti PKS, PPP dan PBB secara tegas menamakan dirinya sebagai Partai politik Islam. Sementara PKB dan PAN secara jelas berlatarbelakang sebagai organisasi sosial keagamaan menamakan dirinya sebagai partai terbuka bagi penganut agama manapun[59]

Berdasarkan kajian ilmu politik, penggunaan istilah "Partai Islam" setidaknya memiliki dua konotasi. Pertama, ideologi organisasi yaitu merujuk pada partai politik yang menjadikan Islam

---

[58] Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 8.

[59] Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 15.

sebagai dasar ideologinya. Ideologi organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. Ideologi menjadi alat pembeda antara satu partai dengan partai lainnya. Kedua, basis sosio-kultural yaitu partai politik dilihat bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya bentuk organisasinya namun lebih kepada basis sisio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan dengan data dan fakta historis partai yang berasaskan Islam dibagi menjadi tiga kategori: pertama, partai Islam yang berasaskan Islam, kedua partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila, ketiga partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa Islam.[60]

ciri-ciri partai politik Islam adalah sebagai berikut:

a. Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai azas dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai.
b. Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai landasan untuk kemantapan perjuangan partai.
c. Partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
d. Partai yang mempunyai program perjuangan untuk Islam, umat Islam, serta kemaslahatan umat, baik lewat jalur parlementer maupun ekstra parlementer.
e. Partai mempunyai basis pendukung, kader, dan partisan yang keseluruhannya beragama Islam.

---

[60] A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), hlm. 13.

Ciri di atas merupakan ciri khas partai politik Islam. Partai politik berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Banyaknya partai politik Islam sekarang ini tentu memunculkan keuntungan sekaligus kerugian. Menurut Cipto (2000: 64) keuntungan akan banyaknya partai Islam adalah semakin banyak pilihan bagi umat Islam yang tersebar di berbagai komunitas tradisional (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam) maupun komunitas modern (kampus, birokrasi, dan sektor-sektor swasta). Sedangkan kerugiannya terletak pada kesulitan partai dalam menentukan kantong-kantong pemilih mana yang potensial bagi masing-masing partai.

Banyaknya partai dan bertambahnya kemudahan dalam memilih partai dalam era reformasi akan membuat umat Islam tak perlu terfokus pada salah satu partai yang mungkin dirasa terlalu sempit. Berbagai kecenderungan baru dalam komunitas Islam Indonesia akibat perubahan sosial ekonomi adalah lahan subur bagi partai-partai baru. Umat Islam yang semakin cerdas kini tidak lagi harus terfokus pada satu partai Islam. Secara keseluruhan, partai-partai baru akan memperluas tingkat partisipasi umat Islam secara lebih konkret.

2. Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia

Menurut Th. Sumartana, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berbasis agama. Pertama, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. Kedua, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. Ketiga, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik

yang lahir dari komunitasnya sendiri dan tidak percaya apabila politik dikuasai oleh kelompok agama yang lain.[61]

Ada beberapa alasan mengapa partai politik Islam diperlukan di Indonesia. Pertama, faktor teologis. Dalam Islam, hubungan antara agama dan negara belum terselesaikan. Dalam kitab suci memang tidak dikatakan secara eksplisit tentang hubungan tersebut. Ia hanya menjelaskan secara global dan garis-garis besarnya saja, seperti perlunya penegakan keadilan, persamaan, musyawarah dan toleransi. Oleh karena sifatnya guidelines tersebut, kemudian menumbuhkan berbagai penafsiran terhadap masalah hubungan antara agama dan negara.

Ada tiga pandangan tentang hubungan agama dan negara, yaitu bersifat integrated, simbiosis-mutualisme dan sekularistik. Dalam kaitannya itu, perlu adanya partai politik Islam berkaitan dengan pandangan yang pertama, yaitu bersatunya antara agama dan negara. Agama tidak bisa dipisahkan, karena itu Islam adalah din wa daulah (Islam itu agama sekaligus juga kedaulatan/negara). Mengenai urusan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya urusan negara dan politik, merupakan bagian yang melekat dari urusan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini, perlu adanya kekuasaan politik. Kekuasaan ini diperlukan untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan demikian pendirian partai politik Islam merupakan suatu keharusan atas dasar pandangan teologis tersebut.[62]

Kedua, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Data BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai prosentase 87% dibanding pemeluk agama lain. Jumlah mayoritas tersebut merupakan kekuatan besar bagi kelompok muslim untuk menggalang kekuatan melalui partai politik dan menyalurkan aspirasi politik yang sesuai dengan

---

[61] Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam*; *Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 77.

[62] Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam*…, hlm. 79.

nilainilai luhur Islam. Anggapannya, penduduk mayoritas akan merasa lebih aman dan nyaman jika menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik Islam.

Atas dasar itulah, pendirian partai politik di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Konteks soisologis inilah yang digunakan oleh elit-elit Islam untuk mendirikan partai politik Islam. Namun kelompok Islam abangan dan substansialistik menolak bentuk-bentuk formalistik agama sehingga mereka menginginkan partai politik yang berorientasi pada nasionalis-religius.

Ketiga, faktor historis. Dalam sejarah Indonesia, Islam merupakan satu kekuatan yang sangat berperan melawan penjajahan. Sebelum kemerdekaan, kelompok Islam merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajah Belanda maupun Jepang. Hal ini terbukti dengan kelahiran organisasi-organisasi sosial maupun politik seperti Budi Oetomo, Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang berbasis muslim dan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Elit-elit dari gerakan ini bersatu padu melawan penjajah dengan harapan bumi pertiwi dapat tegak dan merdeka. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa secra historis keberadaan partai politik Islam tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan dalam menegakkan Republik Indonesia. Bahkan mayoritas para pendiri dan pencetus dasar-dasar negara adalah kalangan muslim. Atas dasar itulah partai politik di Indonesia merupakan keniscayaan dari hasil perjuangan panjang Indonesia.

Dengan demikian, kemunculan dan keberadaan partai Islam di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dari sejarah politik itu sendiri. Islam, kaum muslimin dan politik menjadi satu entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun besarnya jumlah umat Islam tersebut tidaklah serta merta seragam satu pemikiran. Sebaliknya, jumlah yang banyak itulah menyebabkan heterogenitas di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh faktor perbedaan budaya, pendidikan, agama, konteks sosial-politik serta realitas

yang dihadapi oleh mereka di masing-masing daerahnya. Para ahli memiliki perbedaan pendapat dalam mengklasifikasikan keragaman umat Islam di Indonesia.

Partai politik Islam di Indonesia muncul dan berjalan dalam beberapa rentang waktu; Partai Politik Berasas Islam Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang), Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi Liberal, Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi OrdeBaru, Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi Reformasi. Berikut sejarah partai politik Islam sesuai dengan masa perjalanannya di Indonesia:

a. Partai Politik Berasas Islam Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Partai politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam semua itu semua organisasi apakah itu bertujuan sosial seperti (Budi Utomo atau Muhammadyah) ataupun menganut asas politik atau agama seperti (Sarikat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler seperti (PNI dan PKI), memainkan peran penting dalam perkembanganya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa kini menunjukan keanekaragaman dan diteruskan dalam bentuk sistem multi partai.

Tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Nusantara bisa dikatakan perlawanan Islam, terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan dan penindasan.

Karena itu pada awal abad ke-20 kita menyaksikan berdirinya organisasi Islam, baik yang bergerak di bidang politik ataupun sosial keagamaan. Tercatat Serikat Islam (1912) yang berasal dari SDI Sarekat Dagang Islam, Muhamadiah (1912), Persatuan Islam (1920), Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiah Islamiah (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Dari perkembangan

organisasi-organisasi Islam tersebut. Setidaknya ada dua fenomena yang terjadi pada dekade awal abad-20an tersebut.[63]

Persaingan antara komunis dan Islam dalam tubuh sarikat Islam menyebabkan orang-orang Komunis terpaksa harus dikeluarkan dari SI. Gerakan komunis ini semakin hebat sejak kembalinya dari Moskow pada pertengahan 1922 meskipun harus berdiri di luar SI. Corak politik pada masa 1922 pada umumnya semakin radikal konsentrasi radikal di volkstrad merupakan manifestasi perkembangan ini. Pada awal tahun 1923 banyak organisasi pribadi yang cenderung mengambil sikap non kooperatif dan menolak imperialis.[64]

Dengan didirikannya volkstraad[65] maka beberapa partai dan organisas bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam volkstraad, yakni fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-putra) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesia nasional Groep di bawah pimpinan Mohamad Yamin.

Di luar volkstraad ada usaha untuk melakukan gabungan gabungan partai politik dan menjadikanya semacam dewan perwakilan Nasional. Pada tahun 1939 dibentuk K.R.I (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan darin Parta-partai beraliran Nasional, MIAI (Majelis Islam ala Indonesia), yang merupakan gabungan dari Partai-partai beraliran Islam yang terbentuk pada 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia), yang merupakan

---

[63] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*…, hlm. 171.

[64] AQib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES,1985), hlm. 59-60.

[65] Dalam penulisan kata "volkstraad" *penulis merujuk kepada kamus politik kontempore. Kata"volkstraad" bararti, sebuah lembaga DPR yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1918 demi memenuhi tuntutan pergerakan kebangsaan Indonesia. Volkstraad lebih mengutamakan memberi nasehat kepada Gubernur Jendral daripada "menyuarakan" kehendak rakyat.*

gabungan organisasi buruh. Polarisasi politik[66] antara kalangan Nasionalis netral agama dan Nasionalis muslim dapat terlihat umpamanya dengan adanya Budi Utomo, Sarekat Islam, Jong Java disamping Jong Islamieten Bond, Taman Siswa, Mohamadiah dan NU, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), MIAI, serta Jawa Hokokai disamping Masyumi.[67]

Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, kegiatan politik pada masa Jepang dilarang, hanya golongan orang-orang Islam diakomodasi dengan dibentuknya MIAI pada 5 september 1942 dan berubah menjadi partai Masyumi 1943. Akan tetapi satu bulan sesudah Proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapatkan antusias. Keadaan seperti ini tidak banyak berubah hingga tahun 1950-an karena Indonesia mengalami masa transisi kemerdekan, itusebabnya para cendekiawan lebih berfokus pada pembentukan dan ideologi negara.

Pada kurun waktu antara 1950-1959, ketika Indonesia menjalankan prinsip demokrasi parlementer, ketegangan Islam dan negara kembali memanas dalam bentuk perseteruan partai politik berasaskan Islam, seperti partai Masyumi dan partai NU, dengan partai politik sekuler: partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia dan sebagainya. Perseteruan ideologi Islam versus Sekuler kembali dalam persidangan kunstituante hasil pemilu demokratis yang pertama pada tahun 1955.[68] Pada masa ini yang paling dekat dan dilindungi oleh presiden serta mengejar berbagai

---

[66] Dalam penulisan kata "polarisasi politik" penulis merujuk kepada kamus politik kontempore. Kata "polarisasi politik" berarti: terjadinya pertentangan politik.

[67] Muhamad Iqbal dakk, *Pemikiran Politik Islam* (Jakareta: Kencana, 2010), hlm. 254.

[68] A. Ubaedilah, *Pendidikan Kewarganegaraan,cet.4* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 99.

kepentingan melalui Presiden adalah, PNI, PKI, dan kadang-kadang NU.[69]

b. Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi Liberal

Sebagaimana diharapkan tokoh-tokoh Islam, pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan secepatnya setelah kemerdekaan Indonesia. Namun karena awal kemerdekaan Indonesia mengalami revolusi mempertahankan kemerdekaan, pemilu yang diimpikan umat Islam belum terlaksana. Barulah pada 29 september 1955, pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Dari pemilu itu setidaknya ada tiga ideologi yang meraih suara terbesar dan akan bersaing di konstituante nantinya. Ketiganya adalah: Islam, Nasionalis dan Komunis.[70]

Dari sekian banyak partai politik yang ada, yang paling dominan denganbanyaknya dukungan masa adalah partai berasaskan Islam Masyumi dan NU, serta partai ideologi PNI dan PKI. Keempat partai ini memiliki wilayah dukungan sendirisendiri. Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) memperoleh suara banyak dari Masyarakat Muslim baik yang bertempat tinggal di Jawa maupun di luar jawa, sementara NU (Nahdlatul Ulama) memperoleh banyak suara hanya di Jawa.

PNI (Partai Nasional Indonesia) memperoleh banyak dukungan dari Masyarakat Muslim di pulau Jawa. PNI (Partai Nasional Indonesia) memperoleh banyak dukungan dari para pamong praja (Pegawai Pemerintah) terutama di pulau Jawa,

---

[69] R. William liddle, *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia Pada Awal Orde Baru,* (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti), hlm. 186.

[70] Muhamad IQbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer…*, hlm. 261-262.

sedangkan PKI (Partai Komunis Indonesia) menarik masa buruh termasuk buruh tani didaerah pedesaan di Jawa.[71]

Budaya politik masyarakat yang menjadikan pemimpin pada posisi yang tinggi telah memudahkan para elit politik menghimpun masa kepada partai politik yang dibentuknya.Dengan demikian terdapat partai politik dalam jumlah yang besar baik yang mendasarkan diri pada ikatan primordial maupun ideologi yang terbawa masuk sejalan dengan pendidikan yang di peroleh oleh para elit terdidik.

Jumlah partai politik terjadi semakin banyak dan begitu mudah terjadi perpecahan dalam tubuh partai. Tak jarang perbedaan pendapat terjadi pada tubuh partai mendorong perpecahan yang berahir dengan partai baru oleh partai yang berkonflik itu. Partai baru mudah dibentuk karena adanya keterikatan masa yang kuat terhadap pemimpin. Dengan demikian setiap partai politik sesungguhnya memiliki dukungan sendiri-sendiri.

c. Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi Orde Baru

Kegagalan percobaan kudeta PKI pada 30 september 1965 membawa konsekuense pemerintah Orde Lama tumbang dan muncul pemerintah Orde Baru. Banyak tokoh Islam berfikir bahwa hancurnya PKI akan memberarti penting Islam dalam masyarakat, dan Islam akan menjadi kekuatan politik sebagaimana terjadi pada masa demokrasi parlementer namun yang terjadi sebaliknya.[72]

Di tengah keterpurukan partai berasaskan Islam Masa Orde Baru PBB tampil sebagai partai berasaskan Islam yang menghidupkan lagi nama besar partai berasaskan Islam Masyumi. Partaiberasaskan Islam lain yang tegas membawa nama partai

---

[71] Carlton Clymer Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 482-483.

[72] Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 19.

Masyumi adalah partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Di masa Orde Lama Masyumi dikenal sebagai partai kelompok modernis Islam, sedangkan NU dikategorikan sebagai partai tradisionalis Islam.

Masyumi telah bubar pada tahun 1960, sehingga kelompok modernis Islam telah kehilangan partai. Pada masa Orde Baru masih ada partai berasaskan Islam yaitu, PPP yang merupakan fusi empat partai, yakni NU, Paratai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiah. Tetapi kelihatanya kalangan modernis tidak cukup tertampung oleh partai ini, karena kelompok ini lebih suka politik yang tidak mengatasnamakan Islam, tetapi memiliki komitmen yang jelas pada Islam yaitu Golkar.[73]

Dalam masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan lebih luas. Akan tetapi, setelah diadakan pemilihan umum pada 1971, di mana Golkar menjadi partai pemenang utama dengan disusul tiga partai besar NU, Permusi dan PNI, agaknya partai-parrtai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam proses akan tetap terbatas.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partrai Sarikat Indonesia dan Perti bergabung dengan PPP. Selain dari itu lima partai yaitu: Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik dan Partai Murba dan Partai Pendukung Kemerdekaan Indonesia, (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrat Pembangunan. Dengan demikian, dengan pemilihan umum yang akan diadakan pada tahun 1977 akan diikutsertakan dua partai dan Golkar.[74]

Penyederhanaan partai politik merupakan bagian dari birokratisasi politik Orde Baru, yang berkaitan erat dengan formasi negara yang sedang dibangun. Menurut Richard Robison, ada

---

[73] Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 13.

beberapa asumsi mengenai formasi Negara Orde Baru, antara lain Orde Baru dilihat sebagai negara teknokratis dan politik birokratis.[75]

Selama Orde Baru (1971-1997) Golkar menguasai secara mutlak perolehan suara di seluruh propinsi, sehingga membawa partai beringin ini menjadi partai pemenang, bahkan mendapatkan legitimasi untuk memerintah karena ia menguasai perangkat eksekutif dan legiselatif sekaligus.[76]

Kebiasaan partai-partai politik di jaman Orde Baru yang membentuk organisasi-organisasi *underbouw* harus pula dilarang. Bukan organisasinya dilarang tapi sifat *underbouw* nya. Kalo organisasi itu dimasukan ke dalam bagian dari partai maka sekaligus saja dari para anggotanya "masuk menjadi anggota partai", dan organisasinya melebur menyatu dengan partai politik.[77]

Adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang mengarahkan pemikiranpemikiran keagamaan sehingga tidak memunculkan dan terbentuknya partai politik keagamaan. Hal ini sangat terlihat dengan usaha yang dilakukan pemerintahan Soeharto untuk menyederhanakan partai politik berasaskan Islam ke dalam partai politik tunggal. Pemerintahpun menekankan agar partai ini tidak secara ekplisit menampilkan Islam. Nama PPP Partai Persatuan Pembangunan, merupakan seterilisasi usaha pemerintah untuk menghilangkan warna ke-Islaman.

Bahkan pada tahap yang lebih lanjut kemudian lambang Ka'bah sebagai symbol Ke-Islaman pun kemudian dilorotkan,dan berahir dengan dipaksakan dan ditekankan pemakaian asas tunggalpada setiap parpol dan ormas. Langkah- langkah demikian

---

[75] Sudirman Teba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 101-102.

[76] Daniel Dhkidae, *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2004), hlm. 3.

[77] Sri-bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 303.

yang dilakukan pemerintahan Soeharto, jelas merupakan usaha-usaha yang sistematis, baik langsung maupun tidak langsung untuk meminggirkan dan bahkan menghilanggkan simbol-simbol Islam dalam kancah perpolitikan Nasional Indonesia.[78]

d. Partai Politik Berasas Islam Masa Demokrasi Reformasi

Seiring dengan kejatuhan Orba yang ditandai jatuhnyanya Soeharto dan digantikan Habibi umat Islam memanfaatkan momentum euforia reformmasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariah Islam di jalur politik. Hal yang dilakukan Habibi adalah mempercepat pemilihan umum dan memberikan kesempatan yang luas untuk membentuk partai. Hal ini ditandai dengan kenyataan banyaknya partai tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman dan KPU sebagai peserta pemilu berjumlah 48 partai termasuk PPP, yang berganti asas menjadi partai berasasIslam dan kembalinya lambing kabah.[79]

Ketua umum dewan Pimpinan Pusat PPP Hamzah Haz pun dalam Tablig Akbar disilang Monas Jakarta pada 7 Januari 2000 mengajak partai-partai politik Islam untuk menghadapi pemilu 2004. Ajakan ini disambut baik oleh para pemimpin politik Islam[80]

3. Peran dan Fungsi Partai Politik Islam

Secara simbolik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik (zoon politicon atau homo politicus). Politik

---

[78] M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1999), hlm.12.

[79] Muhamad IQbal dkk, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakareta: Kencana, 2010), hlm. 298.

[80] Sudirman Teba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 17.

ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai "cara" yang memang harus lahir sebagai media manusia menggapai harapan. Sejalan dengan hal tersebut menjadi lebih jelas bahwa politik atau siyasah dalam Islam itu makna awalnya adalah mengurusi atau mengatur urusan sosial mayarakat. Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurusi kondisi dan persoalan rakyat. Salah satu tujuan dari pengaturan itu adalah menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh-musuh yang hendak merusak kehidupan masyarakat baik kekuatan perusak yang berasal dari dalam maupun dari luar.[81]

Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam memiliki nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan kedalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Maka dalam menjabarkan ajaran Islam dalam aspek kehidupan diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh oleh setiap muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai Islam kemudian dirumuskan kedalam kerangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual suatu masyarakat tersebut.[82]

Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tentunya, tujuan dari politik Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan dari partai politik Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Qur‟an yang berbunyi Baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan

---

[81] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hlm. 5.

[82] Adnan, *Islam Sosial* (Yogyakarta: Menara Kudus Yogya, 2003), hlm. 35-37.

sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT. Dari tujuan ini dapat dirumuskan tiga tujuan utama partai politik Islam.

a. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara dan lain sebagainya.
b. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.
c. Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan krimimal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkaran tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai politik Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan.[83]

[83]Adnan, *Islam Sosial…,*hlm 38.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitif berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan telah di tetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis, kedudukan Kabupaten Nagan Raya berada pada titik koordinat antara 030.40'-04038' Lintang Utara (LU) dan 960.11-96048' Bujur Timur (BT).

Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya mencapai 3.363,72 kilometer persegi (km2) atau setara 5,86 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km2).[84]

Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, merupakan peluang strategis yang harus didayagunakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat akan berusaha keras menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan. Sedangkan posisi Nagan Raya yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Gayo Lues, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan komoditas hasil pertanian, industry pengolahan, pariwisata, jasa, dan lainnya.

Keadaan topografi wilayah menunjukkan bahwa Nagan Raya memiliki 17 desa terletak di wilayah pesisir dan 205 desa terletak di wilayah non pesisir. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi lain,

---

[84] BPS Nagan Raya Tahun 2020

terdapat 11 desa di sekitar lembah/DAS, 13 desa di sekitar lereng, dan 198 desa berada di daerah dataran.

Jumlah penduduk Nagan Raya pada tahun 2019 adalah sebanyak 167 ribu jiwa. Angka jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebesar 1,71 persen dibandingkan jumlah penduduk tahun sebelumnya. Penduduk Nagan Raya yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Hal ini diketahui berdasarkan nilai rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019, yaitu sebesar 102. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Angka rasio jenis kelamin ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang mendapatkan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2019 tingkat APK menunjukkan angka 107,70 persen pada tingkat SD. Sedangkan APK SMP yaitu 100,32 persen dan 81,60 persen pada usia Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Angka APK Sekolah Dasar (SD) sebesar 107,70 persen menunjukkan bahwa terdapat 7,70 persen penduduk yang masih bersekolah di tingkat pendidikan SD namun usia mereka sudah melebihi usia sekolah SD (7-12 tahun). Selanjutnya, gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas (disebut juga sebagai angkatan kerja). Pada tahun 2019, kebanyakan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya adalah mereka yang berpendidikan SMP (26,1 persen). Persentase untuk pendidikan SMP ini mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun 2018, sedangkan pensentase untuk angkatan kerja berpendidikan SMA mengalami penurunan sebesar 8,1 persen. Kategori pendidikan SMK, DI/II/III, dan Universitas masih menjadi kategori dengan persentase terendah sebagaimana hal ini juga terjadi pada tahun 2018.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan oleh perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Komponen IPM Tahun 2019 diuraikan dalam angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan Pengeluaran Perkapita. Nilai IPM Nagan Raya dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Nagan Raya 68,15 dan meningkat menjadi 69,11 pada tahun 2019.

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga dan sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan yang buruk sangat berperan sebagai media penularan penyakit diantara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, sebagian besar rumah tangga di Nagan Raya telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Sebesar 94,38 persen fasilitas tempat buang air besar rumah tangga adalah jenis kloset leher angsa. Selain itu, sebanyak 84,08 persen rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya telah memiliki tempat tinggal dengan luas lantai perkapita yang melebihi 10 m2 . Artinya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Nagan Raya sudah menempati tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Penggunaan air minum juga menjadi salah satu indikator kualitas perumahan. Pada tahun 2018, terdapat 17,01 persen rumah tangga yang mengonsumsi air minum ledeng/kemasan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 24,32 persen pada tahun 2019. Jika dilihat menurut status kepemilikan rumah, mayoritas rumah tangga Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki tempat tinggal milik sendiri, yaitu sebesar 87,90 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya awal mulanya ditandai dengan pelantikan Pj. Bupati yaitu tepatnya tanggal 22 juli 2002 dan tanggal itu pula sekarang dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Nagan Raya. Pada saat tersebut Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki 5 kecamatan Induk yaitu Kecamatan Beutong, Seunagan Timur, Seunagan, Kuala dan Darul

Makmur. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk menigkatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, sampai saat ini telah dimekarkan kecamatan menjadi 10 kecamatan yang di bagi dalam 27 kemukiman dan 222 Gampong/ Desa dan lembaga Eksekutif yang ada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, secara susunan organisasi terdiri dari 16 Dinas, 14 Lembaga teknis (badan dan kantor).[85]

Salah satu Desa Lung Baroe dan Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue yang menjadi objek lokasi penelitian ini dimana kedua kantor partai yang penulis teliti berada di kecamata Suka makmue. Hasil observasi penulis dimana kantor partai pilitik Islam PKB terletak di Desa Lung Baroe jalan nasional. Kondisi kantor ini seperti sebuah ruko, yang di depannya hanya terpampang pamplet baliho posko atau kantor PKB. Sedangkan kondisi di dalam kantor seperti bukan sebuah kantor. Namun sebuah ruko yang di isi banyak barang pecah belah untuk di perjualkan. Hasil observasi penulis tidak menemukan berkas-berkas yang berhungan dengan kegiatan PKB bahkan struktur kepengurusan PKB juga tidak ada.[86]

Sedangkan kontor partai PKS terletak di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue. Kondisi kantor PKS memang terlihat seperti sebuah kantor. Memiliki pamplet dan fasilitas administrasi kantor, baik komputer, ruang rapat, ruang mushala, dan ruang arsip.[87]

Pada masa awal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Pusat Pemerintahan di terletak di Jeuram Kecamatan Seunagan. Hal ini disebabkan Komplek Perkantoran Suka Makmue belum selesai

---

[85] BPS Nagan Raya Tahun 2021

[86] Hasil Observasi Penulis di Kantor DPC PKB Pada Tanggal 15 Juli 2020.

[87] Hasil Observasi Penulis di Kantor DPC PKS Pada Tanggal 17 Juli 2020.

pembangunannya dan pada Tahun 2008 Pusat Pemerintahan baru mulai pindah ke lokasi yang saat ini kita berada.

Dalam rangka pelaksanan tata kelola pemerintah yang baik khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan undang–undang atau peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendapatkan suatu apresiasi teritnggi dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 18 kali berturut – turut yaitu sejak tahun 2008-2020. Dan ini menjadi suatu kebanggaan tersindiri bagi Pemerintah dan seluruh masyarakat Nagan Raya karena dari sekian banyak kabupaten yang ada di pesisir barat Provinsi Aceh, hanya Nagan Raya yang mampu mendapatkan predikat tersebut.

1. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada awal terbentuknya tahun 2002 berjumlah 142.519 jiwa. Angka tersebut naik drastis hingga mencapai 145.108 jiwa pada tahun 2004, atau rata – rata naik 0.60 persen/tahun. Namun, pasca tsunami penduduk Nagan Raya menurun yaitu hanya tinggal 124.340 jiwa. Penurunan ini diyakini akibat bencana tsunami, di samping disinyalir sebagian kecil penduduk telah berpindah ke tempat lain, sedangkan pada tahun 2019 penduduk Nagan Raya tercatat berjumlah 169.616 jiwa dan pada tahun 2020 penduduk Nagan Raya berjumlah 168.392 jiwa.[88]

Kondisi pemerintahan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penting yang memegang peran besar dalam memajukan suatu daerah, termasuk didalamnya adalah para anggota DPR yang telah dipilih melalui pemilu legislatif. Dari hasil pemilu legislatif, diperoleh sejumlah anggota DPR dari berbgaai partai politik yang akan dilantik sebagai wakil rakyat. Dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2019, Partai Demokrat merupakan

---

[88] BPS Nagan Raya Tahun 2021

partai yang paling banyak menempatkan anggotanya menjadi anggota DPR Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan partai lainnya hanya memperoleh sekitar 2 kursi untuk masing-masing partai.

Berikut ini adalah tabel komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam dua periode terakhir:

	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	**2019-2024**
PKB	2	▼ 1
Gerindra	2	─ 2
PDI Perjuangan	1	▼ 0
Golkar	7	▼ 3
NasDem	3	▼ 2
PAN	2	─ 2
Demokrat	3	▲ 7
Partai Aceh	3	─ 3
SIRA		**(baru)** 3
PNA	1	─ 1
PBB	1	─ 1
Jumlah Anggota	**25**	─ **25**
Jumlah Partai	**10**	─ **10**

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya partai yang penulis teliti hanya mendaptkan satu posisi di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu partai PKB, sedangkan partai PKS tidak mendapatkan posisi selama dua periode.

B. Partai Politik Islam yang Diteliti

Fenomena berdirinya partai partai politik Islam pasca tumbangnya Orde Baru begitu beragam dan cenderung terfragmentasi. Pada titik ini, terlihat bahwa para elit politiknya coba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai penegasan politik identitas yang melekat berikut di bawah ini catatan tentang akar historis lahirnya partai politik Islam:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

a. Sejarah Partai PKB

Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa disingkat PKB. Partai kebangkitan bangsa didirikan pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hujriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu tidak terbatas. Pengurus partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik. Kedaulatan partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tersermin sepenuhnya di dalam muktamar. Asas dan prinsip perjuangan partai PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[89] Sudah menjadi rahasia umum bahwa PKB lahir dari rahim NU dengan motor utama Abdul Rahman Wahid (Gus Dur). Pendirian PKB oleh NU sebagai uapaya untuk mengatasi dua kecenderungan besar yang muncul di NU pasca Orde Baru. Satu kelompok lainnya adalah menginginkan NU tetap menjadi ormas keagamaan. Jalan keluarnya adalah NU membidani pendirian partai, dalam hal ini PKB, untuk fasilitas dan artikulasi kepentingan warga NU tanpa menjadikan NU sebagai partai politik. Dengan demikian, relasi antara NU dengan PKB adalah bersifat historis, kultural, dan aspiratif. Historis artinya pembentukan PKB bertalian erat dengan NU. Kultural berarti perjuangan PKB harus memerhatikan lingkungan kultural khas yang dianut oleh NU, yaitu

---

[89] Hasil Muktamar PKB, AD Art PKB Surabaya, 30 Agustus – 1 september 2014, hlm. 12.

lingkungan kebudayaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sedangkan aspiratif artinya PKB berkewajiban untuk memerjuangkan cita-cita politik yang dimiliki warga NU.[90]

Sebuah partai bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir dari tangan sang inisiator yakni almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selain Gus Dur, partai yang memilki basis di Jawa Timur ini juga diperkuat dengan deklarator lainnya yaitu Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, A. Mustafa Bisri, A. Muhith Muzadi. Penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajenah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, Ketua-ketua event Organisasi NU, para tokoh pesantren dan tokoh masyarakat.

Salah satu bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. PKB berasal dari lapisan tradisionalis dan didirikan untuk mewadahi aspirasi politik

---

[90] Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia,...*, hlm. 142.

nahdliyin. Partai ini tetap tebuka bagi masyarakat di luar NU, baik itu lintas agama, suku maupun golongan.[91]

b. Visi-Misi Partai PKB

Visi misi PKB terdapat dalam *Mabda'Siyasi, Mabda'Siyai* ini adalah roh atau jiwa yang merupakan sumber nilai dari segala kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa. *Mabda'Siyasi* tersebut adalah sebagai berikut:[92]

1. Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sejahtera lahir batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan anak bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebijakan dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama, musyawarah dalam menyelesaikan

---

[91] Agoes Ali Masyhuri, "*Kebangkitan Politik Warga NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), hlm. 257-258.

[92] Kacung Marijan, "*Politik NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung, Pustaka Hidayah: 1999), hlm. 264-270.

persoalan sosial yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan, terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksan agama, terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, terpeliharanyan keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus, terpeliharanya harta benda. Misi ini ditempuh dengan pendekatan *amar ma'ruf nahi mungkar* yakni menyerukan kebijakan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengundang kemungkaran.

4. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dala proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum, sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi halyang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keahlian dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekusaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan bangsa berketepatan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme system yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sehingga arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan

ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yanga adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesame yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, koperatif, dan integrative, tanpa harus saling dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan *humanism religious (insaniyah diniyah),* yang amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasikepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi misi dan program perjuangan, keanggotaan, dan kepemmpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian

menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikan partai.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Sejarah Lahirnya Partai PKS

Kemuncula Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 ternyata cukup menimbulkan keterkejutan publik Indonesia yang saat itu sedang mengalami *euphoria* politik yang luar biasa. Hal ini dikarenakan Partai Keadilan dalam mendeklarasikan partainya sangat jauh berbeda dengan partai-partai lain. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa, peresmian Partai Keadilan di Jakarta saat itu dilakukan secara massal. Hadir sekitar lima puluh ribu pendukungnya, disertai dengan berbagai pergelaran seni Islam. Selain itu, sebagian besar pendukung partai yang hadir adalah anak-anak muda dengan penampilan pisik yang sangat khas dan berbeda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Para pendukung dari kalangan perempuan hampir semuanya mengenakan jilbab yang panjang dan lebar, sementara kalangan prianya kebanyakan mempunyai janggut. Bukan itu saja kebanyakan dari mereka berasal dari golongan terdidik yang terdiri mahasiswa dan para intelektual muda.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berdiri menjelang pemilu 1999, dengan nama Partai Keadilan (PK). Partai ini menjadi fenomenal karena dilahirkan dari gerakan tarbiyah (aktifis muslim kampus). Secara harfiah, tarbiyah berarti pendidikan, namun kata tersebut menurut Liddle dan Mujani, mendapat makna lebih khusus bagi PKS, yakni membangkitkan kesadaran tentang Islam atau Islamic consciousness raising.[93]

Meskipun dalam konstelasi politik Indonesia Partai Keadilan dapat dimasukan kedalam barisan partai-partai Islam yang memang marak berdiri saat itu. Namun agaknya sulit untuk mencari kesamaan antara Partai Keadilan dengan partai-partai Islam lainya,

---

[93] Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*:,..., hlm. 141.

yang umumnya memiliki keterkaitan historis dan idiologis dengan partai-partai Islam dimasa lalu. Namun demikian bukan berarti kemunculan Partai Keadilan tidak mempunyai akar historis sama sekali dengan dinamika sosial politik di Indonesia. Bahkan dalam pengakuan Nur Mahmudi Ismail (Presiden Pertama Partai Keadilan) Partai Keadilan justru mempunyai akar historis dan idiologis yang sangat panjang. Gerakan tarbiyah merupakan prototype dari gerakan dakwah kampus yang mengedepankan aspek pendidikan atau pembinaan jamaah dengan mengacu pada marhalah dakwah yang ditempuh Rasulullah; berupaya mengaplikasikan Islam secara menyeluruh (kaffah), komprehensif (syamil), dan manusiawi (insani). Gerakan ini pada mulanya digagas oleh Hasan Al-Banna. Pada perkembangannya gerakan ini mampu melawan trend politik dan budaya yang cukup kuat di Mesir pertengahan abad 20, menjadi gerakan yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah, Asia, sampai Indonesia, dan kini menjadi gerakan global.[94]

b. Visi-Misi PKS

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hokum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong–royong menjaga kedaulatan Negara.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara structural maupun cultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historis, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya

---

[94] Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 9.

merealisasikan tujuan didirikan PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera.

Masyarakat Madani sebagai warisan sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai piagam Madinah. Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah Saw telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjak kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bias disebut sebagai "Manisfesto berdirinya Masyarakat Madani" yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya, ajakan untuk memperluaskan budaya hidup yang aman dan damai, mengokohkan sikap solidaritas social dan menguatkan semangat silaturahim serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Selain itu Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki visi sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai umat dan bangsa. Visi khusus Partai Keadilan sejahtera partai berpengaruh baik sebagai kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa diberbagai bidang.
3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan system Islam yang *rahmatan lil'alamin.*

4) Akselator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

1) Mempelopori reformasi system politik, pemerintah dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki system rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan pada posisi fungsional.
2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan, peningkatan daya saing industry nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi.
3) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensip dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual dan social sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangu bangsa dan Negara.

C. Pandangan Masyarakat Nagan Raya terhadap Partai Politik Islam

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam metodelogi penelitian, bahwa partai politik Islam yang penulis lakukan di sini adalah dua partai yang aktif di Nagan Raya, yaitu Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Kedua partai ini merupakan partai familiar dan dikenal dalam ranah kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Bukan berarti partai yang lain tidak dikenal, tetapi alasan penulis mengambil penelitian pada partai ini adalah karena kemudahan akses mendapatkan informasi dengan pihak partai tersebut.

Pandangan masyarakat terhadap partai politik tentu berbeda-beda, tidak hanya penilaian masyarakat yang menilai positif, namun juga tentu penilaian masyarakat terhadap partai politik ada yang menilai negatif. Begitu juga dengan pandangan masyarakat yang terjadi di desa, tentu berbeda dengan pandangan masyarakat yang ada di kota, tidak hanya dari segi pola pikir, latar belakang pendidikan, ekonomi dan sosial, tetapi juga dilihat dari perilaku masyarakat. Masyarakat yang pendidikannya rendah cenderung pendidikan politiknya rendah juga dan pengetahuan terhadap politik kurang pula.

Persepsi masyarakat yang terjadi di Nagan Raya berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa pada umumnya pandangan atau persepsi masyarakat Nagan Raya terhadap Partai Politik Islam menunjukkan pandangan positif dan pandangan negatif. Sudah lazimnya segala sesuatu dalam kehidupan ini mendapat padangan positif dan negatif, baik dan buruk dari masyarakat sekitar atau yang menilai.

1. Pandangan Positif

Pandangan positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau respon baik yang diberikan masyarakat terhadap partai politik yang dimaksud. Pada umumnya masyarakat memiliki

persepsi yang baik terhadap partai PKS dan PKB. Hal itu disebabkan karena dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa partai PKB dan PKS benar-benar menunjukkan diri sebagai partai yang berbuat untuk masyarakat Nagan Raya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya program-program pro rakyat yang telah dilakukan, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemic Covid-19 ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua DPC Partai PKS Nagan Raya, Bapak ADS di kantor DPC PKS Nagan Raya, beliau menyebutkan bahwa:[95]

"Pada umumnya masyarakat Nagan Raya menerima, karena ini politik yang berazaskan Islam, dan partai PKS sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama sehingga masyarakat simpati dan mudah menerima kehadiran parati PKS. Apalagi masyarakat Aceh kita pada umumnya punya semangat luar biasa terhadap agama."

"Menerima" atau "penerimaan" yang dimaksud dalam pernyataan Ketua DPC PKS Nagan Raya di atas adalah masyarakat memiliki pandangan positif terhadap partai PKS. PKS hadir ke dalam masyarakat Nagan Raya sebagai partai yang berazaskan Islam dan mengedepankan program-program yang berlandaskan Islam. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan oleh ADS saat diwawancarai oleh penulis:[96]

"Program yang dilakukan DPC banyak, seperti misalnya program kajian rutin ke-Islam-an yang dilaksanakan setiap minggu baik untuk kader PKS itu sendiri maupun untuk masyarakat umum, program ini dengan menghadirkan pemateri/ustadz/Teungku dari berbagai kalangan sesuai dengan topik yang dibahas. Di sini saya selaku ketua DPC melihat betapa antusiasnya masyarakat Nagan

---

[95] Wawancara dengan Adifal Susanto Ketua Partai PKS pada tangga 20 Agustus 2020.

[96] Wawancara dengan Adifal Susanto Ketua Partai PKS pada tangga 15 Septemper 2020.

Raya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian. Selain itu kita juga sering melaksanakan pelatihan kepanduan, agar para kader siap dan sigap dalam menghadapi bencara seperti banjir, apalagi Nagan Raya ini kan sering banjir, juga ada kegiatan bagi-bagi takjil yang dilakukan rutin setiap tahun di dalam bulan suci Ramadhan, juga ada banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat"

Pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara, saat itu DPC PKS Nagan Raya juga sedang melaksanakan kegiatan pelatihan "Penguatan Ketahanan Keluarga". Kegiatan ini digagas oleh PKS dalam rangka menyiapkan kekuatan fisik dan mental keluarga di tengah kondisi Covid-19 dan menyambut kondisi "New Normal". Kegiatan itu sendiri diikuti oleh para kader PKS Nagan Raya dan juga perwakilan masyarakat dari beberapa desa.

Tercapainya pandangan positif masyarakat Nagan Raya terhadap partai PKS tidak terlepas dari peran dan dukungan setiap element masyarakat di setiap desa. Meskipun dukungan suara dari daerah terpencil. Nagan Raya memiliki desa-desa yang bisa dikatakan bukan daerah yang terpencil dan buka pula daerah yang sudah sangat maju. Namun desa-desa di sana terletak di antara ke dua opsi tadi.

Di Nagan Raya ini masyarakatnya antusias dalam mengikuti atau berpatisipasi dalam kegiatan politik di pemilihan umum, seperti pada pemilu dan pilpres 2019 tahun lalu. Hal ini tercermin dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan, salah satunya seperti yang dituturkan oleh Anwar selaku kepala Desa Nigan, beliau menyebutkan tentang respon serta antusiasme masyarakat Desa Nigan:[97]

"Saya sangat mendukung kesuksesan pemilu tahun 2019 lalu. Respon warga saya juga cukup sangat baik dan rata-rata aktif semuanya kecuali yang lanjut usia, kami juga sangat mendukung

---

[97] Wawancara dengan Anwar Kepala Desa Paya Udeung pada tanggal 5 Agustus 2020.

partai-partai yang membawa cirri-ciri Islam dan sering membantu masyarakat dalam berbagai keadaa, seperti misalnya yang aktif di Nagan Raya ini seperti partai PKS dan PKB" partai Islam Banyak banyak yang membantu masyarakat Nigan. Kami pernah menerima bantua pupuk organik untuk petani.[98]

"Menurut Bapak Khaidir ini yang memiliki jabatan sebagai Mukim Paya udeung, masyarakatnya menaruh pandangan positif dalam menyambut program-program dari partai PKS dan PKB. Hal tersebut dibuktikan dengan kesuksesan laju jalannya pemilihan umum di Nagan Raya. Namun peran partai nasionalis dan partai yang berasaskan Islam tidak ada perbedaan. Bahkan sejumlah pengurus partai nasionalis berasal dari tokoh organisasi Islam. Bahkan kader partai politik Islam dan kader Partai nasionalis setelah pemilihan tidak ada yang membedakan".

Senada dengan hal tersebut, seorang warga yang bernama darmawan menyampaikan hal serupa:

"Pandangan masyarakat sangat antusias dan positif terhadap aktifitas politik yang dilakukan oleh partai PKS dan PKB, bahkan sepengetahuan saya masyarakat malah tercerdaskan dengan kehadiran mereka sehinga saat pemilu tidak menjadi golput, semuanya ikut memilih baik tua ataupun muda. Sepengetahuan saya PKS sering melakukan kajian-kajian agama. Dan berbeda dengan partai politik nasional liannya. Saya belum melihat ada partai nasiaonal yang melakukan kajian-kajian rutin keagamaan, banyak partai nasional hanya nampak berperan pada saat-saat mau pemilihan saja.[99]

Perilaku golput yang sering dikhawatirkan muncul apalagi di desa-desa kecil Nagan Raya malah tidak muncul. Memang benar, bahwa Golput dinilai sebagai sikap apatis karena dianggap sebagai tindakan tidak peduli pada persoalan politik yang ada. Rosenberg

---

[98] Wawancara dengan Khaidir.pada 10 November 2020.

[99] Wawancara dengan Darmawan Masyarakat Desa Plok Ie pada tanggal 10 Septemper 2020.

menyebutkan tiga alasan adanya apatis.[100] Alasan pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Alasan kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan control politik. Ketiga yaitu ketidakadaan pesaing politik. Dan ketiga hal yang disampaikan oleh Rosenberg ini tidak terjadi di Desa Nigan.

Selain berpartisipasi dan mendukung jalannya alur pesta demokrasi tersebut, persepsi masyarakat Nagan Raya terhadap partai berazaskan Islam juga tampak dalam penerimaan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh PKS dan PKB, yang dalam hal ini akan penulis paparkan lebih detil pada sub bab khusus tentang peran dan kontribusi partai Islam di Nagan Raya ini.

"Menurut akademisi yang berprofesi sebagai dosen di kampus Sekolah Admitrasi Bisnis di Nagan Raya, bapak Firdaus menyatakan, partai PKS dan PKB kalau dilihat dari asalnya sangat bagus dimana partai ini berbasis Islam, sebagai partai yang mengedepankan visi dan misisnya sesuai asas Islam, dan bersifat kebangsaan, demogkratis dan terbuka. tentu partai partai politik Islam ini harus benar-benar melaksanagan tugas dan kegiatannya sesuai dengan prinsip perjuangan partai berdasarkan nilai-nilai Islam. Sehingga tercapai tujuan dan usahanya. Namun kalau kita melihat perbedaan antar partai politik Islam dengan partai nasionalis hampir tidak bisa kita bedakan, karena partai politi nasioanalis juga melakakan hal yang sama dengan partai politik Islam, yang membedakan partai politi Islam dengan partai politik lainnya hanya soal prestasi, program dan pelaksaannya saja."[101]

---

[100] Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*...,hlm. 105.

[101] Wawancara dengan Firdaus berprofesi sebagai dosen di kampus Sekolah Admitrasi Bisnis di Nagan Raya pada tangal 20 Agustus 2020

Maka dari paparan data yang peneliti himpun hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat diketahui, bahwa pandangan masyarakat, tokoh masyarakatnya semuanya menaruh respon positif untuk partai berazaskan Islam di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga partai politik Islam yang penulis teliti di terima oleh masyarakat Nagan Raya. Dan partai politik Islam hampir sama dengan patai politik lainnya sangat sedikit yang membedakan.

2. Pandangan Negatif

Pandangan negatif adalah kecurigaan yang kurang baik dari manusia, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fatma sebangai masyarakat Nagan Raya saat penulis wawancarai. Menurut beliau, Partai berazaskan Islam di Nagan Raya hanya sekedar bernafaskan Islam saja, namun dalam realitasnya tidak sebagaimana yang dimaksud, Fatma menyebutkan dalam wawancara bahwa:

"iya menurut saya, partai-partai Islam sekarang ini nama dan coraknya saja Islam, tapi dalam program-programnya tergantung siapa sosok kader partai yang mengkomandoi partai tersebut. Jadi tidak bisa kita bilang partai A lebih baik dan lebih bagus dari partai B, apalagi di Nagan Raya ini, sedikit partai-partai yang berazaskan Islam yang bergerak untuk masyarakat. Kami sekeluarga mengenal PKB dan PKS, itupun karena mereka sering terjun ke masyarakat dan buat-buat acara, tapi saat pemilihan kami cenderung memilih yang lebih dekat dan memiliki hubungan keluarga"[102]

[102] Hasil wawancara dengan Fatma salah seorang warga Nagan Raya yang berprofesi sebagai Wiraswasta pada tanggal 18 Agustus 2020.

Senada dengan Ibu Fatmat, Bapak Banta selaku Pemuda di Nagan Raya juga menyampaikan hal serupa, dalam wawancaranya beliau memaparkan bahwa:

"Partai-partai ini (PKB dan PKS) berbuat untuk masyarakat kan karena ada maunya, unsur politisnya, jadi kami sebagai masyarakat dewasa ini juga sudah tidak bisa diakali lagi. Kami melihat. Namun seperti PKS bisa dibilang banyaklah kontribusinya dalam membantu masyarakat, sering mengadakan program-program seperti donor darah bekerja sama dengan PMI, atau seperti kegiatan bakti sosial lainnya. oleh karena itu wajar jika saat pemilihan kami memilih calon-calon dari partai tersebut. Walaupun mereka mengadakan kegiatan karena ada niat-niat tertentu seperti meraup suara terbanyak, mencapai kemenangan dan lain sebagainya, saya rasa sah-sah saja, asalkan mereka memang ada berusaha" namun paratik politik nasionalis juga melakukan hal yang sama dengan partai yang berasaskan Islam dalam melakukan kegiat. Peran dan kegiatannya sering nampak pada saat mau pemilihan semua partai melakukan hal yang sama. Namun dalam hal memilih tergantung masyarakat mau memilih yang mana, biasa lebih melihat kepada mana yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat.[103]

Masyarakat yang memberikan pandangan-pandangan seperti ini bisa dikatakan mereka tidak terlalu peduli tentang apakah partai tersebut bercitra Islam, berazas Islam atau sama halnya dengan partai-partai lainnya. yang mereka lihat dan pikirkan hanya dari sisi apa keuntungan yang mereka dapatkan dari partai tersebut. Itulah yang penulis sebutkan bahwa responden dalam kategori memiliki pandangan negatif politis ini lebih menitik beratkan saling untung satu sama lainnya. Jika partai Islam seperti PKB dan PKS ini bisa memberi keuntungan untuk mereka, maka mereka akan memilih dan memberikan dukungan kepada partai PKS dan PKB tersebut.

---

[103] Hasil wawancara dengan Banta Pemuda Nagan Raya pada tanggal 20 Agustus 2020.

Citra Partai PKS dan PKB di mata orang-orang ini juga menjadi baik dan dibicarakan kebaikannya di mana-mana. Namun jika partai tersebut tidak memberikan keuntungan nyata dalam pandangan mereka, maka menurut mereka partai tersebut tidak baik, dan mereka tidak mendukungnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang Kader Partai PKB dan juga menjabat sebagai Anggota Partai PKB Nagan Raya dan menjabat sebgai DPRK Nagan Raya yang terpilih pada saat pemilihan tahun 2019, Bapak Saiful Bahri mengatakan bahwa:[104]

"Masyarakat kita dewasa ini sudah pandai-pandai, ada macam-macam pandangan mereka terhadap kita. Ada yang benar-benar melihat aksi nyata kita di lapangan, namun ada juga yang berpandangan baik dan buruk terhadap kita sesuai benefit (keuntungan) yang mereka dapatkan dari kita. Jadi meskipun ada program-program yang kita lakukan, namun menurut mereka itu tidak bermanfaat, maka mereka tetap berpandangan jelek atau buruk terhadap partai"

Hal serupa juga dikemukan oleh Ketua Partai PKB Nagan Raya, Bapak Sulaiman Daud, dalam wawancara dengannya beliau menyebutkan bahwa:[105]

"Partai ini sebenarnya milik rakyat, di dalamnyapun diisi oleh rakyat yang bekerja untuk tujuan membantu dan demi kemaslahatan masyarakat. Maka sebagaimana lazimnya manusia, meski ada kebaikan yang kita lakukan, tapi tidak selamanya dipandang baik. Kita juga menyadari bahwa ada banyak program-program kita yang belum maksimal kita laksanakan, namun kita terus berupaya untuk berbuat bagi masyarakat Nagan raya, agar

---

[104] Wawancara dengan Siful Bahri Anggota Partai PKB dan sebagai DPR Nagan Raya pada tanggal 25 Agustus 2020.

[105] Wawancara dengan Sulaiman Daut Ketua DPC partai PKB Nagan Raya pada tanggal 1 Septemper 2020.

masyarakat tau, bahwa eksistensi kita ada ditengah-tengah mereka adalah untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan"

Masyarakat juga sebagian bersikap apatis terhadap pergerakan partai di tengah-tengah mereka. apatis adalah kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu. Kata *apathy* tersebut diadaptasi dari Bahasa Yunani, yaitu apathes yang secara harfiah berarti tanpa perasaan, dapat artikan bahwa apatis adalah hilangnya rasa simpati masyarakat terhadap lingkungannya.

Dari amatan penulis, masyarakat yang bersifat apatis ini cenderung merupakan masyarakat yang memiliki pengalaman politik di dalamnya namun tidak berkesesuaian antara ekspektasi dan realita. Selain itu, sebagian masyarakat yang bersikap apatis juga disebabkan oleh rendanya kesadaran politik dalam diri mereka sendiri.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II di atas bahwa dalam persepsi politik ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah; tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran aparat pemerintahan (tokoh partai), peran kaum intelektual, peran media, dan konflik antara para petinggi politik. Sayangnya para ahli jarang menyebutkan tentang rasionalitas masyarakat dalam menilai. Dan setelah melakukan observasi serta wawancara dengan ragam kalangan masyarakat, peneliti menganggap di, masyarakat semakin terdidik dan pintar dalam menilai peta politik yang dimainkan setiap pemilu meskipun mereka adalah masyarakat desa.

Peneliti tidak sedang mencoba meninggikan dan membanggakan kondisi masyarakat desa peneliti sendiri, tapi menurut peneliti, masyarakat Kabupaten Nagan Raya telah cerdas dalam menyikapi, menilai sehingga memilih untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum dan mendukung partai-partai yang berazaskan Islam tersebut.

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial atau pihak terkait lainnya dalam meningkatkan

partisiapsi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartispasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik.

Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk invidiu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia ingikan dengan ongkos seminimal mungkin.[106]

Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam pemilihan tahun 2019 lalu, Nagan Raya menunjukkan fakta

---

[106] Sudjiono Sastroadmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang, IKIP Semarang Press, 2015), hlm. 56.

adanya peningkatan partisipasi politik sebesar 70 %. Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi partai-partai berazas Islam khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataanya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pilkada.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Coleman mengangap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka.[107]

Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseroang untuk berpartisiapsi dalam politik. Dalam pilkada sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan calon juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mecapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling memengaruhi. Calon memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon.

---

[107] James S. Coleman, *Teori-Teori Ilmu Sosial*, Terj. Budi Raharjo (Jakarta: Aksara Press, 2007), hlm. 47

Masyarakat dan calon akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat terhindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam pilkada.

Hasil amatan peneliti, yang sebelumnya berawal dari sebuah sikap kekhawatiran akan terjadinya praktik *money politic* terbantahkan setelah terjun langsung di lapangan dalam mewawancarai masyarakat atau tokoh terkait lainnya. Partisipasi masyarakat Nagan Raya dalam pemilu 2019 lalu bukan dilandasi oleh iming-iming *money politic*, akan tetapi lebih kepada kesadaran bersama yang berhasil dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang merupakan Tuha Peut gampong setempat yaitu Bapak Jauhari:

"Setau saya tidak ada praktik money politic di Desa saya Nagan Raya ini, jikapun ada mungkin secara tertutup tanpa diketahui oleh public. Tapi saya rasa itu tidak mungkin, mengingat saya telah menjadi geuchik sudah sangat lama di sini, kali ini masyarakat semakin cerdas dan semakin paham, mereka telah mampu menilai sendiri mana pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih, sebab bicara memilih pemimpin ini bukan hanya soalan bicara isi perut hari ini atau esok lusa, tapi bicara masa depan bertahun-tahun akan datang yang akan dinikmati oleh anak cucu".[108]

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pengakuan masyarakat lainnya, misal seperti pengakuan seorang ibu rumah tangga yang bernama Irmayanti:

---

[108] Wawancara dengan Jauhari selaku Tuha Peut di Nagan Raya pada tanggal 5 September 2020..

"Tidak ada tokoh partai atau timses calon yang datang ke desa kami untuk membagi-bagikan uang atau barang lainnya, yang ada hanya ajakan dan seruan untuk mengikuti kampanye di lapangan atau tempat-tempat kampanye, biasanya ini dilaksanakan di kecamatan, sehingga semua masyarakat dari berbagai desa ikut kesana. Apalagi dari partai PKS dan PKB, mereka memang tidak bermain uang, mereka selama ini mengajak dan menarik hati masyarakat melalui program-program yang telah mereka lakukan beberapa waktu yang lalu."[109]

Keikutsertaan dari masyarakat untuk menjadi timses juga menjadi sebuah faktor yang akurat dalam fakto yang mempengaruhi pandangan masyarakat. karena dalam hal ini, masyarakat bukan hanya menjadi penonton dan pemilih saja, tapi juga menjadi aktor di dalamnya. Walaupun masyarakat yang menjadi timses ini menyerukan untuk memilih kandidat yang diusung partainya, namun bukan hanya menjadi sebuah perlombaan di sana, tapi secara langsung telah menjadi media berjalan yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih.

Terkait hal ini terbukti dengan adanya penegasan dari salah seorang warga yang juga merupakan timses calon, menurut Bapak Naufal tidak ada paksaan dalam memilih siapapun, namun karena masyarakat sudah dapat menilai sendiri, maka yang terpilih dan merupakan suara mutlak untuk satu calon tersebut adalah kesadaran masyarakatnya yang telah melihat dan menilai bahwa si calon memang layak untuk dipilih.

Dari beberapa pernyataan warga dan hasil amatan peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat yaitu meskipun mungkin ada partisipasi politik warga yang dilatar belakangi oleh pengaruh pemberian uang atau barang dan semacamnya, namun umumnya di Kabupaten Nagan Raya kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi.

---

[109] Wawancara dengan Irmayanti masyarakat Nagan Raya pada tangan 5 Agustus 2020.

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi adalah disebabkan oleh pengaruh sosialisasi yang baik serta tingkat kecerdasan warga yang telah pandai dalam menilai dan menyikapi pergerakan dan program-program yang dilakukan oleh partai PKB dan PKS selama ini.

Masyarakat telah menggunakan persepsi logis dalam menilai pergerakan parrtai-partai yang benar-benar berbuat untuk mereka. Persepsi logis ini adalah menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh diluar jangkauan para pemilih. dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan itu digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

E. Peran dan Kontribusi Partai PKS dan PKB dalam Masyarakat

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dalam masa pandemic Covid-19 ini. Partai PKS dan PKB selama ini telah berkontribusi dalam banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbuat untuk masyarakat. Beberapa peran dan kontribusi kedua partai ini untuk masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS selama ini telah melaksanakan program-program dengan tujuan mencerdaskan masyarakat agar kesadaran politik masyarakat meningkat. Program-program PKS identik dengan program-

program pengabdian dan terjauhi dari unsur money politik dalam masyarakatnya. Program-program tersebut antara lain adalah:[110]

a. Melaksanakan program kajian keagamaan rutin setiap satu minggu sekali yang diikuti oleh kader partai PKS dan masyarakat umum.
b. Program kepanduan dan pengabdian terhadap masyarakat yang terkena musibah bencana alam.
c. Program pembagian takjil rutin setiap bulan Suci Ramadhan.
d. Memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat Kabupaten melalui DPR Kabupaten, yang meskipun dalam hal ini, di tahun 2019 lalu PKS tidak mendapatkan kursi di Nagan Raya.
e. Saat penulis berada di lokasi penelitian, PKS sedang melaksanakan kegiatan pelatihan Penguatan Ketahanan Keluarga. Sebuah program pelatihan untuk menghadapi situasi-situasi genting di tengah masa pandemi.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tidak jauh berbeda dengan partai PKS, Partai PKB juga memiliki banyak kontribusi terhadap masyarakat Nagan Raya, walaupun PKB tidak memiliki gaung sedahsyat partai-partai Nasional lainnya di Aceh, atau image mereka juga tidak segarang partai local, namun ada beberapa program yang menunjukkan kontribusi nyata partai PKB di tengah-tengah masyarakat Nagan Raya terlebih dalam masa-masa pandemic ini, yaitu:[111]

---

[110] Hasil wawancara dengan Adifal Ketua Patai PKS pada tanggal 18 Agustus 2020.

[111] Hasil wawancara dengan Sulaiman Daut Ketua DPC partai PKB Nagan Raya pada tanggal 1 Septemper 2020.

a. Menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat Kabupaten.
b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Baksos ke desa-desa terpencil.
c. Menyalurkan bantuan membagikan Al-Quran ked ayah-dayah di Nagan Raya.
d. Dalam masa Pandemi Covid, PKB memiliki program membagi-bagikan masker gratis kepada masyarakat.

Program kerja partai PKB juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam kondisi tertentu, misal dalam masa covid-19 ini, mereka lebih kepada mensosialisasikan protokol kesehatan, membagi-bagikan masker atau semacamnya. Sedangkan saat masa-masa musibah bencana alam, mereka turun berkhidmat dan terkadang bergabung dengan partai-partai lainnya untuk membantu masyarakat yang tertimpa banjir atau semacamnya.

Memang kontribusi ke dua partai PKS dan PKB yang penulis teliti ini dapat dikatakan tidak sebesar kontribusi dan peran partai lokal di sana. Karena kekuatan saat ini di Kabupaten Nagan Raya juga masih dikuasai oleh dua partai local yang terus saling bertarung untuk mendapatkan citra di masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Nagan Raya terhadap partai politik Islam ada yang menilai positif dan negatif. Hal tersebut tergantung bagaimana masyarakat melihat aksi-aksi nyata para pertugas partai di lapangan. Adapun hal positif bahwa partai PKB dan PKS benar-benar menunjukkan diri sebagai partai yang berbuat untuk masyarakat Nagan Raya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya program-program pro rakyat yang telah dilakukan. Yang beranggapan negatif bahwa partai berazaskan Islam di Nagan Raya hanya sekedar coraknya saja Islam, tapi dalam program-programnya tergantung siapa sosok kader partai yang mengkomandoi partai tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana masyarakat memamahi, membuka diri dan melihat aksi-aksi nyata yang dilakukan para pertugas partai di lapangan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat Nagan Raya terhadap partai berasis Islam PKS dan PKB yang paling melekat adalah faktor kesadaran dan pendidikan politik yang dimiliki masyarakat, di samping tidak dapat dinafikan terdapat kecurigaan bahwa faktor *money politic* tetap ada. Namun dalam PKS dan PKB mereka tidak melakukan tindakan *money politic*. Mereka hanya menarik simpati dan dukungan melalui pendekatan-pendekatan dan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang berbasis pengabdian kepada masyarakat.

Peran dan kontribusi partai PKS dan PKB di Nagan Raya, kedua-duanya menjadi penyambung aspirasi untuk menyampaikan keluhan masyarakat ke DPR Kabupaten Nagan Raya. Selain dari itu, kedua partai ini sering mengadakan kegiatan atau program kajian rutin keagamaan baik bersifat mingguan atau bulanan. PKB dan PKS juga berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terkena banjir dan musibah bencana alam lainnya. PKB dan PKS

juga mengadakan program membantu masyarakat yang terdampak covid-19 dengan melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan dan membagi-bagikan masker kesehatan.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan di atas, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi pijakan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Masih banyak hal-hal baru yang dapat diteliti seperti melihat kontribusi partai politik Islam terhadap pendidikan, peranan partai politik Islam terhadap sistem pemerintah di Aceh.

Selain dari pada itu, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini, maka oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003.

A. Ubaedilah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Agoes Ali Masyhuri, *"Kebangkitan Politik Warga NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek.* Bandung. Pustaka Hidayah: 1999.

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. 1985.

Arief Budiman, EEP Sefulloh Fata Dkk, *Memilih Partai Mendambakan Presiden: Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milenium*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.

Arnold Stein Berg, *Kampanye Politik dalam Praktek*. Jakarta: Intermasa. 1981.

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu. 1989.

Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara. 1997.

Clyme Carlton r Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Daniel Dhkidae, *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2004.

Edward Djony, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera* .Bandung: PT Syaamil Cipta Media .2006.

Eggi Sudjana. *Islam Fungsional*. Jakarta: Rajawali. 2008.

Fatahullah Jurdi, *Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis. 2016.

Firman Subagyo, *Menata Partai Politik*. Rmbooks: Jakarta. 2009.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2011.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*. Semarang: Walisongo Press. 2010.

Isnani Nurul Fajri (2017), *Sikap Masyarakat terhadap Partai Politik Islam*. Studi Kasus Kelurahan kompri Jaya, Kecamatan Sukarame. Kota Banda Lampung.

Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya. 1990.

James S. Coleman, *Teori-Teori Ilmu Sosial*, Terj. Budi Raharjo. Jakarta: Aksara Press. 2007.

Kacung Marijan, "Politik NU" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung. Pustaka Hidayah: 1999.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah.* Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.

Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.

Mattew B. Miles A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohindi. Jakarta: UI Pers, 1992.

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada. 1999.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Muhammad Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Media. 2008.

Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima. 2009.

Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*. Jakarta:Bumi Aksara. 2006.

M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1999.

Muhamad IQbal dkk, *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.

Munir Mulkan, *Sosiologi Poitik Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2011.

Nusrati, *Sistem Politik Islam (Sebuah Pengantar).* Jakarta: Nur-al Huda. 2015.

Nanang Tahqiq, *Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.

Noor, Hardian (2017) *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu.* Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Rusdi Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yagyakarta: Ar-Rijal Institut. 2007

Safril Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing. 2013.

Saiful Mujani, R. William Lidle, dan Kuskrriho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analilis tentang Perilaku Memiih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Media Utama.2012.

Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1989.

Sugihartono, dkk, *Persepsi-Persepsi Dalam Psikologi*. Medan: Rinneka Cipta. 200.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* .Jakarta: Bima Aksara. 1997.

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta 2010.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cita. 1993.

Surbakti, *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesi. 2010.

Stephen P Robbins, *Perilaku Organisai : Konsep, Kontroversi, aplikasi, edisi Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Prenhalindo. 1999.

Sudirman Teba, *Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2011.

Sri-bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total.* Jakarta: Erlangga. 2001

Sudjiono Sastroadmojo, *Perilaku Politik. Semarang*, IKIP Semarang Press. 2015.

Sudirman Teba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Thoyib, dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. RemajaRosdakarya. 2002.

Ugiyona, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2005.

Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*. Bandung: Tarsito. 1984.

Peter Schroder, *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich. 2008.

Zuly Qodir, *Sosiologi Poitik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

BPS Nagan Raya Tahun 2021

Hasil Muktamar PKB, AD Art PKB Surabaya, 30 Agustus – 1 september 2014.

Wawancara dengan Anwar Kepala Desa Paya Udeung pada tanggal 5 Agustu 2020.

Wawancara dengan Khaidir Kepala Desa Nigan pada tanggal 10 Agustus 2020..

Wawancara dengan Darmawan Masyarakat Desa Plok Ie pada tanggal 10 Septemper 2020.

Wawancara dengan Firdaus berprofesi sebagai dosen di kampus Sekolah Admitrasi Bisnis di Nagan Raya pada tangal 20 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Banta Pemuda Nagan Raya pada tanggal 20 Agustus 2020.

Wawancara dengan Siful Bahri Anggota Partai PKB dan sebagai DPR Nagan Raya pada tanggal 25 Agustus 2020.

Wawancara dengan Sulaiman Daud Ketua DPC partai PKB Nagan Raya pada tanggal 1 Septemper 2020.

Wawancara dengan Jauhari Tuha Peut di Nagan Raya pada tanggal 5 September 2020

Wawancara dengan Irmayanti masyarakat Nagan Raya pada tangan 5 Agustus 2020.

Hasil wawancara Zainal yang bekerja di KIP Nagan Raya pada tanggal 5 september 2020.

http://jurnal.umrah.ac.id/wp. *Said Riduan*, Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik Di Kelurahan Penyengat Kota Tanjungpinang. Di akses pada tanggal 20 Juni 2020.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 146/Un.08/Ps/03/2020
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. **Dr. Lukman Hakim, M.** Ag
2. **Dr. Husna M. Amin, M.** Hum

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a	**: Fitri Muliati**
Nomor Induk	**: 29173465**
Prodi	**: Ilmu Agama Islam**
Konsentrasi	**: Pemikiran dalam Islam**
Judul	**: Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)**

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Maret 2020
Direktur,

Mukhsin Nyak umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 02 April 2020

Nomor : 1111/Un.08/Ps.1/04/2020
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Kepada Yth

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Cabang Nagan Raya

di-

Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a	**: Fitri Muliati**
NIM	**: 29173465**
Prodi	**: Ilmu Agama Islam**
Konsentrasi	**: Pemikiran dalam Islam**
Alamat	**: Nagan Raya**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***" Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur,
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@gmail.com Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 02 April 2020

Nomor : 1111/Un.08/Ps.1/04/2020
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Kepada Yth
Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cabang Nagan Raya
di-
Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a	**: Fitri Muliati**
NIM	**: 29173465**
Prodi	**: Ilmu Agama Islam**
Konsentrasi	**: *Pemikiran dalam Islam***
Alamat	**: Nagan Raya**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***" Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur,

Wakil Direktur

Mustafa A.

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nasional Simpang Peut-Jeuram-Lung Baro Hp: 0852 6033 4989

Nomor : 39/PKB/ 2020 Lung Baro, 2 Juni 2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr, wb

Dengan hormat sesuai dengan surat saudara pada Tanggal 02 April 2020 Nomor: 1111/un.08/Ps.1/04/2020.Tentang Pengantar Penelitian Tesis a.n Fitri Muliati. Maka dengan ini ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nagan Raya menerangkan bahwa benar mahasiswi yang tersebut di atas telah datang dan melakukan penelitian di kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nagan Raya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama kami ucapkan terimakasih.

Ketua Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa
Nagan Raya

Tgk. H. Sulaiman Daud

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS

Nomor : 45 /D/AA-20-PKS/1441
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian**

Suka Makmue,06 Dzulqa'idah 1441
27 Juni 2020

Kepada Ykh,
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Shalawat dan Salam atas Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Dengan hormat, sesuai dengan surat saudara pada tanggal 02 April 2020 nomor: 1111/un.08/Ps.1/04/2020, tentang Pengantar Penelitian Tesis a.n Fitri Muliati. Maka dengan ini ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa benar mahasiswi yang tersebut diatas telah datang dan melakukan penelitian di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Nagan Raya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahi khairan katsira.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN NAGAN RAYA

ADIFAL SUSANTO,S.TP
Ketua Umum

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera
Jl. Nasional, Simpang Peut-Jeuram Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Aceh
Website:http://www.pk-sejahtera.org, email:pks_nagan@yahoo.com

Pedoman Wawancara:

"PANDANGAN MASYARAKAT ACEH TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Pada Partai Politik Islam di Kabupaten Nagan Raya)"

A. Pertanyaan Untuk Ketua/Pengurus Harian DPC PKS Nagan Raya

NAMA :
ALAMAT :
UMUR :
JABATAN :

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua DPC PKS Nagan Raya?

   Jawaban :

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan DPC PKS di Nagan Raya ini?

   Jawaban:

3. Apa saja usaha program kegiatan yang telah dilakukan oleh Partai PKS untuk masyarakat Nagan Raya di tahun 2019-2020 ini?

   Jawaban:

4. Menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat Nagan Raya terhadap Partai PKS ini ?

   Jawaban:

5. Menurut Bapak apa yang membedakan partai politik Islam dengan Partai politik lainnya yang ada di Aceh ?

   Jawaban:

6. Apakah ada perbedaan di mata masyarakat antara partai politik berazas Islam seperti PKS ini dengan Partai Politik Lainnya ?

   Jawaban:

7. Ada berapa kursi legislatif yang didapatkan oleh PKS di Kabupaten Nagan Raya ini ?

   Jawaban:

8. Apakah masyarakat mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PKS Nagan Raya ini?

   Jawaban:

9. Apa kendala yang dihadapi oleh DPC PKS Nagan Raya untk mendapatkan dukungan masyarakat ?

   Jawaban:

B. Pertanyaan Untuk Ketua/Pengurus Harian DPC PKB Nagan Raya

NAMA :
UMUR :

ALAMAT :
JABATAN :

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua DPC PKB Nagan Raya?

   Jawaban :

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan DPC PKB di Nagan Raya ini?

   Jawaban:

3. Apa saja usaha program kegiatan yang telah dilakukan oleh Partai PKB untuk masyarakat Nagan Raya di tahun 2019-2020 ini?

   Jawaban:

4. Menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat Nagan Raya terhadap Partai PKB ini ?

   Jawaban:

5. Menurut Bapak apa yang membedakan partai politik Islam dengan Partai politik lainnya yang ada di Aceh ?

   Jawaban:

6. Apakah ada perbedaan di mata masyarakat antara partai politik berazas Islam seperti PKB ini dengan Partai Politik Lainnya ?

Jawaban:

7. Ada berapa kursi legislatif yang didapatkan oleh PKB di Kabupaten Nagan Raya ini ?

   Jawaban:

8. Apakah masyarakat mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PKB Nagan Raya ini?

   Jawaban:

9. Apa kendala yang dihadapi oleh DPC PKB Nagan Raya untk mendapatkan dukungan masyarakat ?

   Jawaban:

C. Pertanyaan Untuk Masyarakat Nagan Raya

NAMA :
UMUR :
ALAMAT :
PEKERJAAN :

1. Apa yang anda ketahui tentang Partai Politik Islam?
   Jawaban:

2. Apa saja partai politik Islam yang aktif di Nagan Raya ini?
   Jawaban:

3. Menurut anda, apa saja kelebihan dan perbedaan Partai Politik Islam, dengan partai politik lainnya?
   Jawaban:

4. Apakah selama ini DPC PKS dan DPC PKB ada melaksanakan program kegiatan yang bersifat membantu masyarakat ?
   Jawaban:

5. Jika ada apa saja bentuk kegiatan yang Bapak/Ibu ketahui?
   Jawaban:

6. Apakah Bapak/Ibu ada memilih DPRK yang berasal dari Partai PKS atau Partai PKB ?
   Jawaban:
7. Apa alasan Bapak/Ibu memilihnya?
   Jawaban:

8. Apa saja yang telah dilakukan oleh Partai PKB dan PKS untuk menyuarakan Apsirasi masyarakat ?
   Jawaban:

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi kendala bagi Partai Politik Islam seperti PKB dan PKS dalam berkhidmat untuk masyarakat di Nagan Raya ini ?
   Jawaban:

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto-Foto di Lokasi Penelitian

Foto pada saat wawancara dengan darmawan masyarakat Nagan Raya pada pada tanggal 20 Agustus 2020.

Foto pada saat wawancara dengan Deka masyarakat Nagan Raya pada pada tanggal 25 Agustus 2020.

Foto kegiatan yang dilakuka oleh partai DPC PKS Nagan Raya